



**DETERMINAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
TERHADAP KEMISKINAN DI KAB/KOTA PROVINSI
SUMATERA UTARA (STUDI KASUS 5 KAB/KOTA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

**ANNISA ANGGREINI SISWANTO
1515210042**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

ABSTRAK

Pembangunan merupakan sebuah proses perubahan kearah yang lebih baik. Pembangunan sebaiknya mengarah kepada manusia sebagai tujuan akhir pembangunan, dan bukan sebagai alat pembangunan. Pembangunan manusia di 5 Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara (Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo dan Pematang Siantar) masih kurang maksimal dan kurang merata, terbukti dengan masih rendahnya angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan juga kemiskinan yang terjadi antar wilayah Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Investasi, Pendapatan Asli Daerah, Gini Rasio dan Belanja Daerah berpengaruh terhadap IPM dan Kemiskinan di 5 Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2006-2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dan analisis jalur (*path analys*). Hasil penelitian dengan metode analisis regresi data panel ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Kab/Kota Sumatera Utara, variabel gini rasio berpengaruh positif terhadap IPM di Kab/Kota Sumatera Utara. Hasil penelitian dengan metode analisis jalur (*path analys*) dari variabel terpilih menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kab/Kota Sumatera Utara, variabel gini rasio tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kab/Kota Sumatera Utara dan variabel IPM berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Kata Kunci : IPM, Kemiskinan, TPT, PDB, Inflasi, Investasi, PAD, Gini Rasio, Belanja Daerah, Panel Regression dan Path Analys.

ABSTRACT

Development is a process of change for the better. Development should aim at humans as the ultimate goal of development, and not as a development tool. Human development in 5 Regencies / Cities in North Sumatra Province (Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo and Pematang Siantar) is still less than optimal and uneven, as evidenced by the low HDI (Human Development Index) and also poverty that occurs between North Sumatra . This study aims to analyze how Open Unemployment Rate, Economic Growth, Inflation, Investment, Regional Original Income, Gini Ratio and Regional Expenditure affect HDI and Poverty in 5 Districts / Cities of North Sumatra Province in 2006-2015. The method used in this research is panel data regression analysis and path analysis. The results of this study using the panel data regression analysis method show that economic growth variables have a positive and significant effect on HDI in North Sumatra Regency / City, the Gini variable has a positive effect on HDI in North Sumatra Regency / City. The results of the study with the path analysis method of the selected variables indicate that the variable of economic growth has a negative and significant effect on poverty in the District / City of North Sumatra, the Gini variable is not significant to poverty in the District / City of North Sumatra and the HDI variable influences the level poverty.

Keywords: *HDI, Poverty, TPT, GDP, Inflation, Investment, PAD, Gini Ratio, Regional Expenditures, Panel Regression and Path Analysis.*

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRAC</i>	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori	12
1. Teori Indeks Pembangunan Manusia.....	12
a. Pengertian IPM.....	12
b. Keterkaitan Hubungan IPM	13
2. Konsep Kemiskinan.....	16
a. Pengertian Kemiskinan	16

b. Jenis-Jenis Kemiskinan	17
c. Teori Lingkaran Kemiskinan	19
d. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan	19
3. Tingkat Pengangguran Terbuka.....	20
a. Pengertian Pengangguran Terbuka.....	20
b. Jenis-Jenis Pengangguran	20
4. Pertumbuhan Ekonomi	22
a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi.....	22
5. Inflasi	23
a. Pengertian Inflasi.....	23
b. Jenis Inflasi Berdasarkan Sifatnya	23
c. Jenis Inflasi Berdasarkan Sebab Terjadinya	24
d. Pengaruh Inflasi	25
e. Teori Inflasi.....	26
6. Investasi	27
a. Pengertian Investasi.....	27
7. Pendapatan Asli Daerah.....	28
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	28
b. Retribusi Daerah	29
8. Belanja Daerah.....	32
a. Pengertian Belanja Daerah.....	32
b. Jenis-Jenis Belanja Daerah.....	33
9. Indeks Gini Rasio	37
a. Pengertian Gini Rasio	37
B. Penelitian Terdahulu.....	38
C. Kerangka Konseptual.....	41

D. Hipotesis	43
--------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	45
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	45
C. Definisi Operasional Variabel	47
D. Jenis Data.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Analisis Data.....	48

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	51
1. Deskripsi IPM di 5 Kab/Kota	51
2. Deskripsi Persentase Kemiskinan di 5 Kab/Kota	51
3. Hasil Uji Asumsi Klasik Data Panel.....	52
a. Uji Normalitas	52
b. Uji Autokorelasi.....	53
4. Analisis Data Panel.....	54
5. Hasil Uji Signifikansi	54
a. Uji Simultan	54
b. Uji Parsial.....	55
c. Koefisien Determinasi.....	57
6. Pengujian Asumsi Klasik <i>Path Analys</i>	57
a. Uji Normalitas Data	57
b. Uji Multikolinieritas.....	60
c. Uji Heteroskedastisitas.....	62

7. Pengujian <i>Test Goodness Of Fit</i>	64
a. Model Analisis Regresi Berganda.....	64
b. Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)	65
c. Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)	67
d. Uji Determinasi	68
e. Menghitung Pengaruh	70
f. Menghitung Koefisien Jalur	71
B. Pembahasan	73
1. Pengaruh PDB Terhadap IPM	73
2. Pengaruh Gini Rasio terhadap IPM	75
3. Pengaruh PDB terhadap Kemiskinan	76
4. Pengaruh Gini Rasio terhadap Kemiskinan.....	78
5. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan	79

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 1.1 Data IPM 5 Kab/Kota Provinsi	4
Tabel 1.2 Data Persentase Penduduk Miskin	5
Tabel 2.1 Jurnal Terdahulu.....	38
Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian.....	46
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel	47
Tabel 4.1 Hasil Estimasi Model	48
Tabel 4.2 Uji Multikolinieritas I.....	55
Tabel 4.3 Uji Multikolinieritas II	55
Tabel 4.4 Regresi Linier Berganda I	58
Tabel 4.5 Regresi Linier Berganda II	59
Tabel 4.6 Simultan I	60
Tabel 4.7 Simultan II.....	60
Tabel 4.8 Uji Parsial I.....	61
Tabel 4.9 Uji Parsial II	62
Tabel 4.10 Uji Determinasi I.....	63
Tabel 4.11 Uji Determinasi II.....	63

DAFTAR GAMBAR

HALAMAN

Gambar 1.1 Grafik IPM.....	4
Gambar 1.2 Grafik Persentase Penduduk Miskin.....	5
Gambar 2.1 Teori Lingkaran Setan Kemiskinan.....	19
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Panel.....	42
Gambar 2.3 Kerangka Koseptual Setelah Panel Regression.....	43
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas.....	51
Gambar 4.2 Histogram Uji Normalitas I.....	56
Gambar 4.3 Histogram Uji Normalitas II.....	56
Gambar 4.4 PP Plot Uji Normalitas I.....	57
Gambar 4.5 PP Plot Uji Normalitas II.....	57
Gambar 4.6 Scatterplot Uji Heteroskedastisitas I.....	61
Gambar 4.7 Scatterplot Uji Heteroskedastisitas II.....	61

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat mengajukan skripsi ini yang disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Adapun judul yang penulis ajukan adalah sebagai berikut : “Determinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan di 5 Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus 5 Kab/Kota).”

Dalam mempersiapkan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan berupa bimbingan dan petunjuk. Untuk itu pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan dorongan, nasehat, kasih sayang, do'a, dan dukungan material dan spiritual.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE.,MM selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Surya Nita, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Bapak Saimara Sebayang, SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
5. Bapak Drs. Kasim Siyo.,M.Si.,Ph.D selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Rahmad Sembiring, SE.,M.SP selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dari awal kuliah hingga sekarang ini.

7. Seftiyanti Diningrum, Kak Nova Maia Sari, Napsiah Nasution, Kak Riski Damaiyanti, Kak Mutiara Indah Sari, Boy Riski Akbar, dan Abang Deprayoga Pratama selaku rekan kerja, teman terbaik penulis dan team terhebat untuk diajak makan. Terima kasih atas motivasi dan semangat yang telah diberikan.
8. Nindi Lestari, Novita Iswahyuni, Tia Atikah, Diana Soraya, dan Kak Uci Handayani selaku teman yang sangat luar biasa, teman yang handal untuk cerita, dan sahabat terbaik penulis. Terima kasih banyak atas motivasi, cerewatan yang berbobot, dan semangat yang kadang naik turun.
9. Si Abang Agus Maksum selaku pendengar dan motivator handal yang selalu setia mendampingi, memberikan semangat, dan dukungan bagi penulis.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga dalam penyusunan skripsi ini nantinya dapat berguna bagi penulis dan para pembaca sekalian, dan terutama sekali lagi kepada Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Mudah-mudahan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Medan, 7 Januari 2019
Penulis

Annisa Anggreini Siswanto

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan akhir pembangunan adalah kesejahteraan rakyat. Manusia bukan hanya objek pembangunan tetapi diharapkan dapat menjadi subjek, sehingga dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kemajuan suatu wilayah yang secara makro menjadi kemajuan suatu Negara. Jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran di Sumatera Utara yang masih tinggi, di nilai perlu untuk terus di tekan persentasenya pada 2011. Sebab, bila dua hal ini tidak segera ditangani, dampaknya bisa menyebabkan kerawanan sosial dan terjadinya instabilitas di tingkat lokal.

Dari akhir Desember 2009 hingga April 2010, sebaran penduduk yang menganggur masih menumpuk di perkotaan, dan sebaran penduduk miskin masih tetap dominan di pedesaan. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Menurut M.Nasir dalam Ernawati (2012) permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensi. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu.

Pengklasifikasian antara Negara maju, berkembang atau Negara terbelakang dapat menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang menjelaskan

bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks Pembangunan Manusia terdiri dari tiga komponen yang berhubungan dengan tingkat produktifitas masyarakatnya. Dengan masyarakat yang sehat dan berpendidikan, produktifitas masyarakat akan meningkat dan akan meningkat pula pengeluaran untuk konsumsinya, ketika pengeluaran untuk konsumsi meningkat maka tingkat kemiskinan akan menurun.

5 Kabupaten/Kota yang dipilih oleh penulis adalah Kota Medan sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara, Kota Binjai yang merupakan kota Smart City dan sebagai kota yang berencana akan masa pengalihan menjadi kawasan industri, Kota Pematang Siantar yang sedang gencar dalam pembangunan Jalan Tol Tahap I Ruas Tebing Tinggi – Siantar dan sebagai Kota Pusat Kegiatan Wilayah di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo yang terkenal sebagai penghasil kopi terbaik dan sebagai Kabupaten yang sedang menjalankan 2 sektor yaitu sektor pariwisata dan sektor agribisnis, dan terakhir Kabupaten Deli Serdang yang memiliki potensi pariwisata yang baik dan memiliki keunggulan hasil produksi yang baik.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan suatu alat ukur kualitas hidup masyarakat dengan melihat dari tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia mengakibatkan produktivitas kerja penduduk juga berkurang. Ada beberapa manfaat dari Indeks Pembangunan Manusia

diantaranya, untuk menegaskan bahwa kriteria utama dalam menilai pembangunan suatu Negara bukan Pertumbuhan Ekonomi.

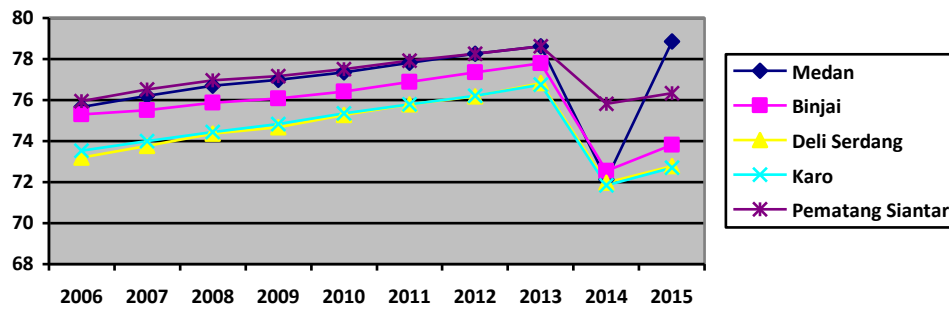
Selain Indeks Pembangunan Manusia penurunan pengangguran di suatu Negara diharapkan juga mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif untuk mencari pekerjaan. Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut (Sukirno, 1997). Pengangguran dapat terjadi karena ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja.

Fenomena masalah dalam penelitian ini yaitu dengan melihat respon variabel – variabel intervening dalam mempengaruhi variabel bebas di 5 kab/kota provinsi Sumatera Utara dalam periode penelitian (2001 s/d 2015), sebagai berikut :

Tabel 1.1 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 5 Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara (Persen) Tahun 2006 s/d 2015

N	TAHUN	MEDAN	BINJAI	DELI SERDANG	KARO	PEMATANG SIANTAR
		IPM (%)	IPM (%)	IPM (%)	IPM (%)	IPM (%)
1	2006	75,65	75,3	73,2	73,52	75,95
2	2007	76,22	75,51	73,76	74,01	76,52
3	2008	76,7	75,88	74,36	74,43	76,95
4	2009	76,99	76,09	74,67	74,84	77,18
5	2010	77,36	76,41	75,28	75,34	77,51
6	2011	77,81	76,88	75,78	75,79	77,93
7	2012	78,25	77,36	76,17	76,22	78,27
8	2013	78,62	77,79	76,82	76,76	78,62
9	2014	72,13	72,55	71,98	71,84	75,83
10	2015	78,87	73,81	72,79	72,69	76,34

Sumber : BPS Sumut



Gambar 1.1 : Perkembangan IPM (Persen %) 5 Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006 s/d 2015

Sumber : Tabel 1.1

Berdasarkan tabel dan grafik di atas diketahui bahwa adanya pertumbuhan IPM 5 Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 menurun dari tahun sebelumnya, Kota Medan menurun 6,49%, Kota Binjai menurun sebesar 5,24%, Kab. Deli Serdang menurun sebesar 4,84%, Kab. Karo menurun sebesar 4,92%, dan Kota Pematang Siantar menurun sebesar 2,79%.

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS,2007). Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua Negara. Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator dalam mengatasi masalah kemiskinan, karena pertumbuhan ekonomi merupakan konsep dari pembangunan ekonomi (Atalay,2015).

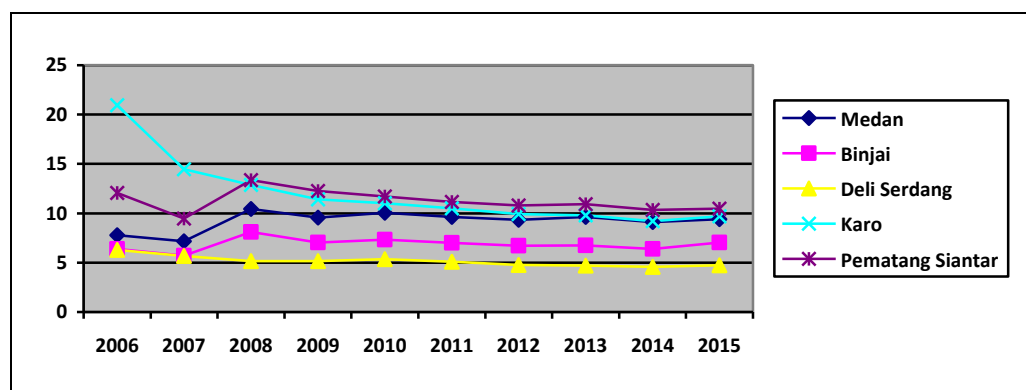
Berbagai studi empiris yang telah ada menunjukkan bahwa harapan pembangunan ekonomi adalah untuk membawa perbaikan ekonomi, seperti pengentasan kemiskinan, standar pendidikan yang lebih baik atau perbaikan kesehatan (Nakabugo,2012). Pertumbuhan ekonomi sendiri dapat menjadi

kekuatan pendorong untuk menghasilkan kekayaan yang nantinya akan menetes kebawah untuk memberantas kemiskinan.

Tabel 1.2 : Kemiskinan 5 Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006 s/d 2015 (Persen)

N	Tahun	Medan	Binjai	Deli Serdang	Karo	Pematang Siantar
		JPM (%)	JPM (%)	JPM (%)	JPM (%)	JPM (%)
1	2006	7,77	6,38	6,29	20,96	12,07
2	2007	7,17	5,72	5,67	14,47	9,46
3	2008	10,43	8,12	5,16	12,86	13,36
4	2009	9,58	7,04	5,17	11,42	12,25
5	2010	10,05	7,33	5,34	11,02	11,72
6	2011	9,63	7	5,10	10,49	11,15
7	2012	9,33	6,72	4,78	9,93	10,79
8	2013	9,64	6,75	4,71	9,79	10,93
9	2014	9,12	6,38	4,56	9,20	10,35
10	2015	9,41	7,03	4,74	9,68	10,47

Sumber : BPS Sumut



Gambar 1.2 : Laju Jumlah Penduduk Miskin di 5 Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006 s/d 2015

Sumber : Tabel 1.2

Berdasarkan tabel dan grafik di atas diketahui terjadi kenaikan tertinggi terjadi di Kabupaten Karo pada tahun 2006 mencapai 20,96 persen, untuk Kota Medan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2008 mencapai 10,43 persen, Kota

Binjai kenaikan tertinggi pada tahun 2008 mencapai 8,12 persen, Kabupaten Deli Serdang mencapai 6,29 persen pada tahun 2006 dan Kota Pematang Siantar persentase penduduk miskin tertinggi terjadi pada tahun 2008 mencapai 13,36 persen.

Agar kemiskinan tidak semakin akut, maka pemerintah harus meletakkan kemiskinan menjadi pusat perhatian, beberapa ahli menyebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah dengan menciptakan aktivitas ekonomi pada daerah guna guna menciptakan pertumbuhan ekonomi (Yacoub, 2012). Pertumbuhan ekonomi yang ada nantinya diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru sehingga berkurangnya pengangguran yang ada, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga dapat berkurangnya kemiskinan.

Disisi lain pengangguran merupakan salah satu penyebab kemiskinan. Pengangguran, setengah menganggur, atau kurangnya lahan produktif sebagai asset penghasil pendapatan merupakan hal yang akut bagi masyarakat miskin ketika dalam memperoleh kebutuhan paling dasar untuk makanan, air, dan tempat tinggal adalah hal yang harus diperjuangkan pada setiap harinya (David, 2017).

Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara berkurang sebesar 129.700 jiwa dari jumlah 1.416.400 jiwa pada tahun 2013. Penurunan ini merupakan dampak positif akibat menurunnya tren inflasi, naiknya nilai tukar petani serta menurunnya tingkat pengangguran terbuka. Menurut Sharp, dikutip (Kuncoro, 2006) penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi adalah akibat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia. Di sisi lain (Kartasmita, 2008) kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh rendahnya derajat kesehatan.

Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir, dan prakarsa.

Kesehatan masyarakat Sumatera Utara umumnya juga cenderung mengalami perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari Angka Harapan Hidup (e_0), Angka Kematian Bayi (IMR), dan Total Kelahiran (TFR). Pada tahun 2016, setiap bayi lahir hidup memiliki harapan hidup sebesar 68,04 tahun, terjadi kenaikan menjadi 68,29 tahun pada tahun 2015. Angka harapan hidup ini didapat dengan menggunakan IPM Metode terbaru. Sementara itu pada tahun 2010, ada sebanyak 26 bayi meninggal dari 1.000 bayi lahir hidup, angka ini mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 27 per 1.000 kelahiran.

Secara umum, keadaan kesejahteraan rakyat Sumatera Utara meningkat pada tahun 2015. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu terus diupayakan peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi yang dapat menjaga kesinambungan pembangunan dan penciptaan lapangan kerja serta berkurangnya penduduk miskin, sehingga bermanfaat pada meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Untuk memperoleh kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Perkembangan IPM pada tahun 2014 menurun sebesar 6,49% dan kembali meningkat pada tahun 2015.
- b. Persentase Penduduk Miskin tertinggi terjadi pada tahun 2006, kemudian kembali naik pada tahun 2008.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi agar pembahasannya lebih fokus dan terarah serta tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan. Dengan demikian penulis membatasi masalah hanya pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan di 5 Kab/Kota (Medan, Binjai, Pematang Siantar, Karo dan Deli Serdang) Provinsi Sumatera Utara, dengan menggunakan Model *Panel Regression dan Path Analys* dengan variabel bebas TPT, PDB, Inflasi, Investasi, PAD, Gini Rasio, dan Belanja Daerah.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dibahas penulis adalah :

- a. Faktor manakah (TPT, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Investasi, PAD, Gini Rasio, Belanja Daerah) yang relevan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan di 5 Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara ?
- b. Apakah faktor-faktor yang sudah terpilih merupakan faktor yang paling berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan di 5 Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- a. Untuk menganalisis faktor manakah (TPT, PDB, Inflasi, Investasi, PAD, Gini Rasio, dan Belanja Daerah) yang relevan mempengaruhi Indeks pembangunan Manusia dan Kemiskinan di 5 Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara.
- b. Untuk menganalisis signifikansi faktor-faktor yang paling berpengaruh tersebut terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan di 5 Kab/Kota (Medan, Binjai, Pematang Siantar, Karo dan Deli Serdang) Provinsi Sumatera Utara.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah :

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang ekonomi pembangunan khususnya tentang masalah Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan di 5 Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara.

b. Bagi Peneliti Berikutnya

Sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian lebih jauh terutama yang berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan di provinsi Sumatera Utara.

c. Bagi Universitas dan Fakultas

Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan untuk penelitian selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan tentang Indeks Pembangunan Manusia dengan Kemiskinan di 5 Kab/Kota provinsi Sumatera Utara.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Noor Zuhdiyati (2017), Universitas Negeri Semarang (UNS) yang berjudul : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus Pada 33 Provinsi).

Perbedaan penelitian ini terletak pada :

1. **Model Penelitian** : Penelitian terdahulu menggunakan model regresi linear berganda dengan pendekatan uji kuantitatif dengan 1 (satu) variabel terikat dan 3 (tiga) variabel bebas. Sedangkan penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel terikat dan 7 (tujuh) variabel bebas, dengan menggunakan model *Panel Regression* dan *Path Analys*.
2. **Variabel Penelitian** : Penelitian terdahulu menggunakan 1 (satu) variabel terikat yaitu Kemiskinan dan menggunakan 3 (tiga) variabel bebas yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Sedangkan penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel terikat yaitu : Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan serta 7 (Tujuh) variabel bebas yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, PDB, Inflasi, Investasi, PAD, Gini Rasio, dan Belanja Daerah.
3. **Waktu Penelitian** : Penelitian terdahulu dilakukan tahun 2017 sedangkan penelitian ini tahun 2018. Perbedaan model penelitian, variabel penelitian, dapat menjadikan perbedaan yang membuat keaslian penelitian ini dapat terjamin dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Indeks Pembangunan Manusia

Menurut UNDP (dalam BPS, 2015) , Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, dimensi tersebut mencakup umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). IPM dapat digunakan sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dan IPM juga dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Ketiga indikator atau dimensi tersebut merupakan hasil dari terbentuknya data angka Indeks Pembangunan Manusia.

Ketiga dimensi IPM memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Dalam mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup, selanjutnya untuk mengukur dimensi pendidikan digunakan gabungan indikator rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap

sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak (Nurul, 2015).

Kedudukan dan peran IPM dalam pembangunan akan lebih terlihat kalau dilengkapi dengan suatu data yang berisikan indikator yang relevan dengan IPM dan disusun sebagai suatu sistem data yang lengkap. sistem data yang lengkap dan akurat akan lebih dapat mengkaji berbagai kendala dan implementasi program pembangunan pada periode sebelumnya, dan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah untuk dimasukkan sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan periode berikutnya, sehingga diharapkan nilai IPM sebagai tolak ukur pembangunan dapat mencerminkan kondisi kemiskinan masyarakat yang sesungguhnya (Aya, 2016).

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan IPM

Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan barang dan jasa yang di produksi maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya (Baeti,2013).

Hubungan Kemiskinan dengan IPM

Kemiskinan dapat menjadikan efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masalah kemiskinan merupakan sebuah masalah yang kompleks yang sebenarnya bermula dari kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan

pokok sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan pun terabaikan (Mirza, 2013).

Hubungan Pengangguran dengan IPM

Pengangguran yang tinggi termasuk kedalam masalah ekonomi karena hal tersebut menyianyiakan sumber daya yang berharga. Pengangguran juga merupakan masalah social yang besar karena mengakibatkan penderitaan besar untuk pekerja yang menganggur dan harus berjuang dengan pendapatan yang kurang. Jika pengangguran tinggi, keadaan ekonomi yang sulit meluap dan mempengaruhi emosi masyarakat dan kehidupan keluarga (Samuelson, 2004).

Hubungan Belanja Daerah dengan IPM

Kaitan antara pengeluaran untuk sektor publik terhadap pembangunan manusia sebenarnya mudah untuk ditelusuri. Pengeluaran untuk bidang kesehatan diharapkan mampu meningkatkan angka harapan hidup maupun menurunkan angka kematian ibu hamil dan bayi sebagai salah satu komponen dalam penentuan pembangunan manusia (Nurul, 2016).

Hubungan Inflasi dengan IPM

Inflasi berkaitan dengan pembangunan manusia, jika inflasi mengalami peningkatan secara terus menerus maka berakibat pada menurunnya daya beli masyarakat karena secara riil pendapatannya juga akan menurun (Budi, 2016).

Hubungan Investasi Daerah dengan IPM

Dengan adanya penambahan Investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri maka dapat menyerap tenaga kerja. Hal ini dikarenakan dalam proses produksi barang dan jasa meningkat yang pada gilirannya akan menyerap angkatan kerja. Dengan semakin banyak Investasi yang digunakan untuk melakukan proses produksi barang dan jasa, maka akan terjadi pemerataan pendapatan dalam kesejahteraan masyarakat (Haris, 2014).

Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan IPM

IPM dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah dan merupakan penilaian terhadap pemerataan pembangunan sudah berjalan dengan baik. Sumber dana yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, semakin mandiri suatu daerah berarti Pendapatan Asli Daerah mampu membiayai pembangunan daerahnya (Ayu, 2016).

Hubungan Gini Rasio dengan IPM

Gini Rasio merupakan salah satu ukuran ketimpangan dengan nilai antara 0 dan 1. Ketimpangan distribusi pendapatan tetap perlu ditekan sehingga pendapatan merata di setiap kalangan masyarakat. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah meningkatkan pendapatan masyarakat (Atmojo, 2016).

2. Konsep Kemiskinan

Dalam arti *proper*, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu : 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis (Chambers, 2010).

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara, pemahaman utamanya mencakup (Chambers, 2010) :

- a. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang – barang dan pelayanan dasar.
- b. Gambaran tentang kebutuhan sosial termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah – masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
- c. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna memadai di sini sangat berbeda – beda melintasi bagian – bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah untuk konsumsi perbulan. Definisi menurut UNDP , kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan. Pada dasarnya didefinisikan kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu (Cahyat, 2007) :

a. Kemiskinan Absolut

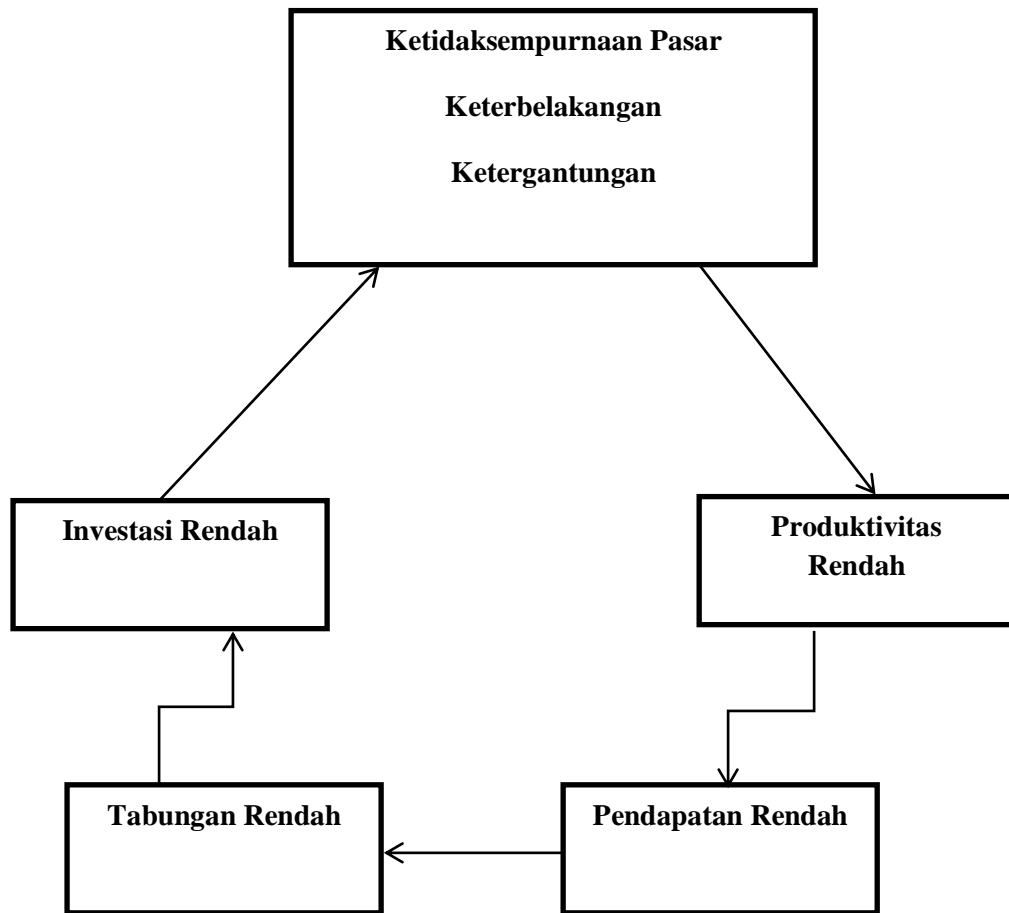
Kemiskinan yang dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Dengan demikian kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya yakni makanan, pakaian dan perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Bank dunia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan di bawah USD \$1/hari dan kemiskinan menengah untuk pendapatan di bawah \$2/hari.

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya (lingkungannya). Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan.

1) Teori Lingkaran Setan Kemiskinan

Penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas menyebabkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan. Logika berpikir ini dikemukakan oleh Ragnar Rukse, ekonom pembangunan ternama di tahun 1953, yang mengatakan : “ *A poor coutry is poor because it is poor* “ (Negara miskin itu karena dia miskin).



Gambar 2.1 Teori Lingkaran Setan Kemiskinan

2) Faktor – Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kemiskinan

Banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan. Menurut penyebab kemiskinan menurut (M. Kuncoro dalam Whisnu Adi, 2011: 20) sebagai berikut :

- a. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.

- b. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, maka upah juga rendah.
- c. Kemiskinan muncul disebabkan perbedaan akses dan modal.

3. Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah persentase penduduk dalam angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama (Kussetiyono, 2013:43).

Berdasarkan pendekatan angkatan kerja, pengangguran terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :

- a. Pengangguran Friksional. Pengangguran jenis ini adalah pengangguran yang muncul karena pencari kerja masih mencari pekerjaan yang sesuai jadi ia menganggur bukan karena tidak ada pekerjaan. Pengangguran ini tidak menimbulkan masalah, dan bisa diselesaikan dengan pertumbuhan ekonomi.
- b. Pengangguran Struktural. Pengangguran structural adalah pengangguran yang muncul karena perubahan struktur dan komposisi perekonomian. Pengangguran ini sulit diatasi karena terkait dengan strategi pembangunan sebuah Negara. Meskipun

demikian, pengangguran jenis ini bisa diatasi dengan melakukan pelatihan agar tercipta tenaga kerja terampil.

- c. Pengangguran Musiman. Pengangguran yang terjadi karena faktor musim, misalnya para pekerja di industri yang mengandalkan hidupnya dari pesanan. Pengangguran jenis ini juga tidak menimbulkan banyak masalah. Meskipun belum ada bukti empirik yang mendukung, pengangguran yang muncul karena keterpurukan industri sebagian besar adalah pengangguran friksional dan struktural.

Hubungan pengangguran dan kemiskinan sangat erat sekali, jika suatu masyarakat sudah bekerja pasti masyarakat atau orang tersebut berkecukupan atau kesejahteraan tinggi, namun di dalam masyarakat ada juga yang belum bekerja atau menganggur, pengangguran secara otomatis akan mengurangi kesejahteraan suatu masyarakat yang secara otomatis juga akan mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu Negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kepada

kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat penting untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, walaupun pertumbuhan ekonomi tidak bisa berdiri sendiri untuk mengentaskan kemiskinan, tetap pertumbuhan ekonomi menjadi faktor utama untuk mengentaskan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Simon Kuznets dalam Todaro, 2004).

Menurut Boediono (dalam Khabhibi,2010:42) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. (Ernawati, 2011: 14) ada perbedaan dalam istilah perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi merupakan perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk.

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyak barang-

barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Syaratnya adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut menyebar disetiap golongan masyarakat, termasuk di golongan penduduk miskin. Dalam penelitian Pastyo (2009: 24), menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

5. Inflasi

Pengertian inflasi secara umum dapat diartikan sebagai kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Ada beberapa jenis inflasi berdasarkan sifatnya (Riri, 2016) :

- a. Inflasi Ringan (<10% setahun), ditandai dengan kenaikan harga berjalan secara lambat dengan persentase yang kecil serta dalam jangka waktu yang relatif.
- b. Inflasi Sedang (10% - 30% setahun), ditandai dengan kenaikan harga yang relatif cepat atau perlu diwaspadai dampaknya terhadap perekonomian.

- c. Inflasi Berat (30% - 100% setahun), ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan kadang-kadang berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi yang artinya harga-harga minggu atau bulan ini lebih tinggi dari minggu atau bulan sebelumnya.
- d. Hiper Inflasi (>100% setahun), dimana inflasi ini paling parah akibatnya. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang, nilai uang merosot dengan tajam, sehingga ditukar dengan barang. Harga-harga naik lima sampai enam kali. Biasanya keadaan ini timbul oleh adanya perang yang dibelanjai atau ditutupi dengan mencetak uang.

1) Berdasarkan sebab terjadinya. Inflasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

a. Demand Pull Inflation,

Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat terhadap berbagai barang terlalu kuat. *Demand Pull Inflation* terjadi karena kenaikan permintaan agregat dimana kondisi perekonomian telah berada pada kesempatan kerja penuh. Jika kondisi produksi telah berada pada kesempatan kerja penuh, maka kenaikan permintaan tidak lagi mendorong kenaikan output atau produksi tetapi hanya mendorong kenaikan harga-harga yang disebut inflasi murni. Kenaikan

permintaan yang melebihi produk domestik bruto akan menyebabkan *inflationary gap* yang menyebabkan inflasi.

b. Cost Push Inflation

Inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi. Pada *Cost Push Inflation* tingkat penawaran lebih rendah dibandingkan tingkat permintaan. Karena adanya kenaikan harga faktor produksi sehingga produsen terpaksa mengurangi produksinya sampai pada jumlah tertentu. Penawaran agregat terus menurun karena adanya kenaikan biaya produksi.

c. Mixed Inflation

Gejala kombinasi antara unsur inflasi yang disebabkan karena kenaikan permintaan dan kenaikan biaya produksi. Pada umumnya bentuk yang sering terjadi adalah inflasi campuran, yaitu kombinasi dari kenaikan permintaan dan kenaikan biaya produksi, dan sering sekali keduanya saling memperkuat satu sama lain.

2) Pengaruh Inflasi

Akibat buruk inflasi dapat dibedakan dalam dua aspek yaitu :

a. Akibatnya terhadap perekonomian ;

- (1) Inflasi menggalakkan spekulasi penanaman modal,
- (2) Tingkat bunga meningkat dan akan mengurangi investasi.
- (3) Terjadi defisit dalam neraca perdagangan serta meningkatkan besarnya hutang luar negeri.

b. Akibatnya kepada individu dan masyarakat ;

- (1) memperburuk distribusi pendapatan,
- (2) Pendapatan riil merosot dan nilai tabungan juga merosot.

3) Teori Inflasi

a. Teori Kuantitas

Inti dari teori kuantitas adalah, bahwa inflasi itu hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang beredar, baik uang kartal maupun uang giral. Bila terjadi kegagalan panen misalnya, yang menyebabkan harga beras naik, tetapi apabila jumlah uang beredar tidak ditambah, maka kenaikan harga beras akan berhenti dengan sendirinya. Laju inflasi ditentukan oleh laju pertumbuhan jumlah uang beredar dan psikologi atau harapan masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa yang akan datang.

b. Teori Keynes

Proses inflasi menurut Keynes adalah proses perebutan pendapatan di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang dapat disediakan oleh masyarakat. Kelompok – kelompok sosial ini misalnya orang-orang pemerintah sendiri, pihak swasta atau bisa juga serikat buruh yang berusaha mendapatkan kenaikan gaji atau upah, hal ini akan berdampak terhadap permintaan barang dan jasa yang pada akibatnya akan menaikkan harga.

c. Teori Strukturalis

Teori ini biasa disebut juga dengan teori inflasi jangka panjang, karena menyoroti sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekakuan struktur ekonomi, khususnya penawaran bahan makanan dan barang-barang ekspor. Karena sebab-sebab struktural ini, penambahan produksi barang lebih lambat dibandingkan peningkatan kebutuhan masyarakat. Akibatnya penawaran (*supply*) barang kurang dari yang dibutuhkan masyarakat, sehingga harga barang dan jasa meningkat.

6. Investasi

Teori ekonomi mendefinisikan Investasi sebagai pengeluaran pemerintah untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Menurut Samuelson (2004: 198), investasi meliputi penambahan stok modal atau barang disuatu negara, seperti bangunan peralatan produksi, dan barang-barang inventaris dalam waktu satu tahun. Investasi merupakan langkah mengorbankan konsumsi di waktu mendatang. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah bentuk upaya menambah modal untuk pembangunan melalui investor dalam negeri. Modal dalam negeri ini bisa didapat baik itu dari pihak swasta maupun pihak pemerintah. Jumlah kumulatif rencana PMDN adalah jumlah seluruh rencana PMDN yang disetujui pemerintah sejak tahun 1968 dengan memperhitungkan pembatalan, perluasan, perubahan, penggabungan, pencabutan dan pengalihan status dari PMDN ke PMA atau sebaliknya.

7. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Siahaan: 2005). Kemudian Pendapatan Asli

Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Cici, 2016).

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (Afrizal, 2009:47).

Sumber-sumber Pendapatan Daerah bersumber dari :

1) Pajak Daerah

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (Kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Afrizal, 2009).

Sedangkan ciri-ciri yang menyertai Pajak itu sendiri dapat di ikhtisarkan seperti berikut (Siahaan, 2005:8) :

- a) Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
- b) Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara;
- c) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah;
- d) Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari Negara kepada para pembayar pajak;
- e) Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak;

2) Retribusi Daerah

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UNP, 2016:12).

Adapun ciri-ciri pokok Retribusi Daerah antara lain yaitu :

- a) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan;
 - b) Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah;
 - c) Pihak yang membayar retribusi mendapat kontraprestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya;
 - d) Retribusi tentang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan;
 - e) Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan antara lain yaitu :
- a) Bagian Laba
 - b) Dividen
 - c) Penjualan saham milik daerah
- 4) Lain-lain PAD yang sah meliputi yaitu :
- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - b) Jasa giro;
 - c) Pendapatan bunga;

- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah;
- f) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h) Pendapatan denda pajak;
- i) Pendapatan denda retribusi;
- j) Pendapatan hasil eksekusi jaminan;
- k) Pendapatan dari pengembalian;
- l) Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- m) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

8. Belanja Daerah

Pengertian Belanja menurut PSAP No.2 adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011, Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Istilah belanja

terdapat dalam laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas (UNP, 2016:9).

Belanja dikasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas. Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan menjadi (Deviani, 2015):

a. Belanja Operasi,

Pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi :

- 1) Belanja Pegawai;
- 2) Belanja Barang;
- 3) Subsidi;
- 4) Hibah;
- 5) Bantuan Sosial;

b. Belanja Modal,

Pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai asset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi:

- 1) Belanja Modal Tanah;
 - 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - 5) Belanja Modal Asset tetap lainnya;
 - 6) Belanja Asset lainnya;
- c. Belanja Lain-lain/Belanja Tidak Terduga

Pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam angka pengelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

d. Belanja Transfer

Pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten/kota serta dana bagi hasil dari kabupaten/kota ke desa.

Belanja Daerah, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang belanja dikelompokkan menjadi:

a. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari belanja:

- 1) Belanja Pegawai;
- 2) Belanja Barang dan Jasa;
- 3) Belanja Modal;

b. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai;
- 2) Belanja Bunga;
- 3) Belanja Subsidi;
- 4) Belanja Hibah;
- 5) Belanja Bantuan Sosial;
- 6) Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa;

Belanja Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat

dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan daerah yang diperoleh baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun dari dana perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai Belanja Daerah (Deviani, 2016).

Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa pada dasarnya, pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam pemberian pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa permintaan terhadap pelayanan publik dapat berbeda-beda antar daerah. Sementara itu, Pemerintah Daerah juga memiliki yang paling dekat dengan publik untuk mengetahui dan mengatasi perbedaan-perbedaan dalam permintaan dan kebutuhan pelayanan publik tersebut. Satu hal yang sangat penting adalah bagaimana memutuskan untuk mendelegasikan tanggung jawab pelayanan publik atau fungsi belanja pada berbagai tingkat pemerintahan (David, 2005).

Secara teori, terdapat dua pendekatan yang berbeda dalam fungsi belanja, yaitu pendekatan “pengeluaran” dan pendekatan “pendapatan”. Menurut pendekatan “pengeluaran”, kewenangan sebagai tanggung jawab antar tingkat pemerintah dirancang sedemikian rupa agar tidak saling timpang tindih. Pendelegasian ditentukan berdasarkan kriteria yang bersifat objektif, seperti tingkat loyalitas dampak dari fungsi tertentu, pertimbangan keseragaman kebijakan dan penyelenggaraan, kemampuan

teknik dan manajerial pada umumnya, pertimbangan faktor-faktor luar yang berkaitan dengan kewilayahan, efisiensi dan skala ekonomi. Dalam pendekatan pendapatan, sumber pendapatan publik dialokasikan antar berbagai tingkat pemerintah yang merupakan hasil dari tawar-menawar politik. Pertukaran politik sangat mempengaruhi dalam pengalokasian sumber dana antar tingkat pemerintahan. Selanjutnya, meskipun pertimbangan prinsip di atas relevan, namun kemampuan daerah menjadi pertimbangan yang utama (Alexouo, 2012).

9. Indeks Gini atau Rasio Gini

Gini Rasio digunakan untuk melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan. Ukuran gini rasio sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara 0 sampai dengan 1. Bila gini rasio mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila gini rasio mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi (Todaro, 2006).

Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai Gini Rasio adalah :

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i(Q_i + Q_{i-1})}{10000}$$

Keterangan :

G = Gini Rasio

P_i = Persentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke- i

Q_i = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas- i

Q_{i-1} = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke- i

k = Banyaknya kelas pendapatan

Nilai Gini antara 0 dan 1, dimana nilai 0 menunjukkan tingkat pemerataan sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1: Review Penelitian Terdahulu

No	Nama / Tahun	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil
1	Noor Zuhdiyati Dan David K (2017)	Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus Pada 33 Provinsi)	Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka	Pendekatan uji kuantitatif dengan uji regresi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara IPM dengan kemiskinan, sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi dan TPT tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.
2	Siti, Agus, dan Sri Undai (2015)	Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Kemiskinan Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	Belanja Pemerintah, Inflasi, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan	Model analisis yang digunakan, yaitu analisis Path	Belanja pemerintah secara langsung berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, sedangkan pengaruh belanja pemerintah secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi
3	Mike Ardila (2017)	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Buton Utara	Indeks Pembangunan Manusia, dan PDB, dan Kemiskinan	Menggunakan metode OLS dilihat dari Regresi Linear dengan SPSS 16	Hasil studi ini menunjukkan bahwa koefisien penentuan (R^2) 0.784, yang berarti 78.4% variabel tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh tingkat pertumbuhan IPM dan PDB. Sementara sisa 21.6 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.
4	Cici, Yani, dan Wali Aya(2016)	Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat	Kemiskinan, Usia, Pendapatan dan	Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data	Hasil menunjukkan bahwa orang-orang miskin di desa Lohia dicirikan oleh: usia produktif,

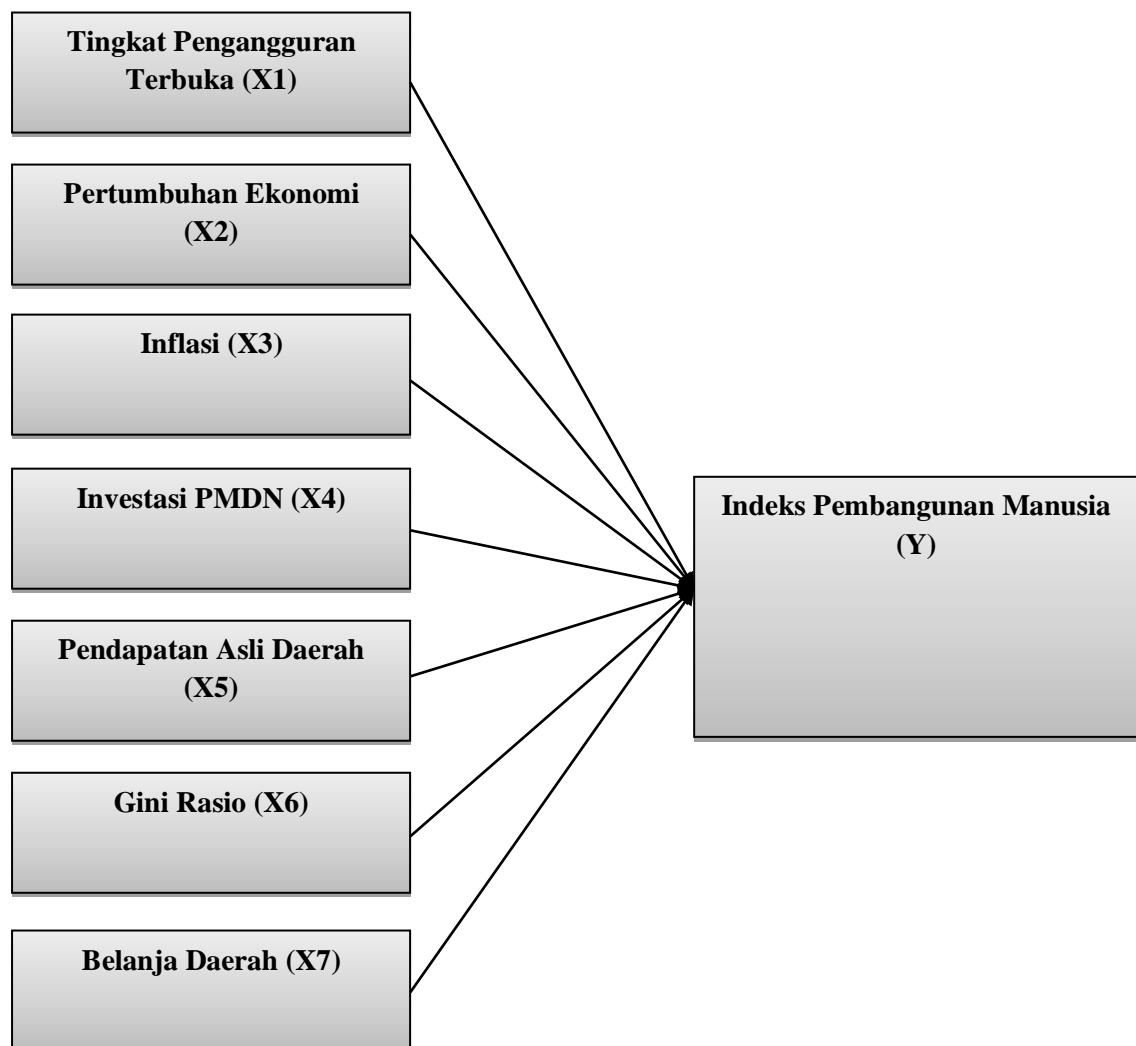
		Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna	Pendidikan	primer dikumpulkan melalui questionare dari 45 responden. Responden ditentukan oleh purposive sampling berdasarkan karakteristik homogen. Data dianalisis dengan deskriptif.	tinggi jumlah anggota keluarga, pendidikan lebih rendah, keterampilan, pendapatan lebih renda dan kurangnya faktor produksi dan lebih rendah adalah etos kerja.
5	<i>Ady Soejoto dan Ameilia Karisma (2011)</i>	Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur	Kemiskinan, PDB, dan Pengangguran	Metode ini menggunakan Regresi Linear Berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki dampak signifikan pada kemiskinan. ini berarti bahwa variasi 86,3 persen kemiskinan di Jatim dapat dijelaskan oleh variasi dalam dua variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengangguran.
6	<i>Aris Jonaidi (2012)</i>	Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia	PDB, Kemiskinan, Pengangguran, Investasi.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan eknometrik dengan model two stage least squared.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada interaksi dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Efek signifikan pada pertumbuhan ekonomi di pengurangan kemiskinan, terutama di daerah pedesaan tidak adalah banyak kantong kemiskinan. kebalikan dari kemiskinan juga pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan

					ekonomi
7	<i>Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf (2014)</i>	Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau	IPM, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, upah minimum dan laju pertumbuhan ekonomi.	Data sekunder yang digunakan adalah data Panel tahun 2006-2011 menurut daerah tingkat II Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Analisis data menggunakan regresi linear berganda.	Dari hasil analisis diketahui tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap IPM. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh negative terhadap IPM, masing-masing dengan koefisien regresi sebesar -0,163 dan 0,084. Upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM, dengan koefisien regresi masing-masing 0,005 dan 0,953. Variable yang sangat besar pengaruhnya terhadap IPM adalah laju pertumbuhan ekonomi.
8	<i>Sussy Susanti (2015)</i>	Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel.	PDRB, IPM, Pengangguran dan Kemiskinan	Analisis kemiskinan ini memerlukan pendekatan analisis yang tidak hanya mempertimbangkan data cross section namun juga menggunakan data time series. Analisis yang tepat untuk permasalahan ini adalah analisis data panel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB, Pengangguran dan IPM berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat pada tahun 2009-2011.

9	<i>Henny, Debby dan Patrick (2016)</i>	Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Terhadap Tingkat Ketimpangan Di Provinsi Sulawesi Utara	PDRB, Tk. Kemiskinan, Disparitas Ekonomi.	Penulis menggunakan metode Regresi.	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum menjadi jawaban sebagai turunya angka Disparitas Ekonomi. Tingkat kemiskinan yang meningkat akan memperbesar angka Disparitas Ekonomi.
10	<i>Handayani Megasari, Syamsul Amar dan Idris (2009)</i>	Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Perekonomian dan Kemiskinan di Indonesia	Konsumsi, Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Pajak, Inflasi, Export, Pendidikan, Pengangguran dan Kemiskinan.	Penelitian ini menggunakan metode Simultan dengan persamaan persamaan TSLS.	Studi menyimpulkan bahwa (1) dengan konsumsi, investasi, ekspor bersih, pengeluaran pemerintah secara signifikan mempengaruhi kemiskinan di perekonomian Indonesia. Peningkatan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, net ekspor dan pengurangan kemiskinan akan mengakibatkan peningkatan perekonomian Indonesia.

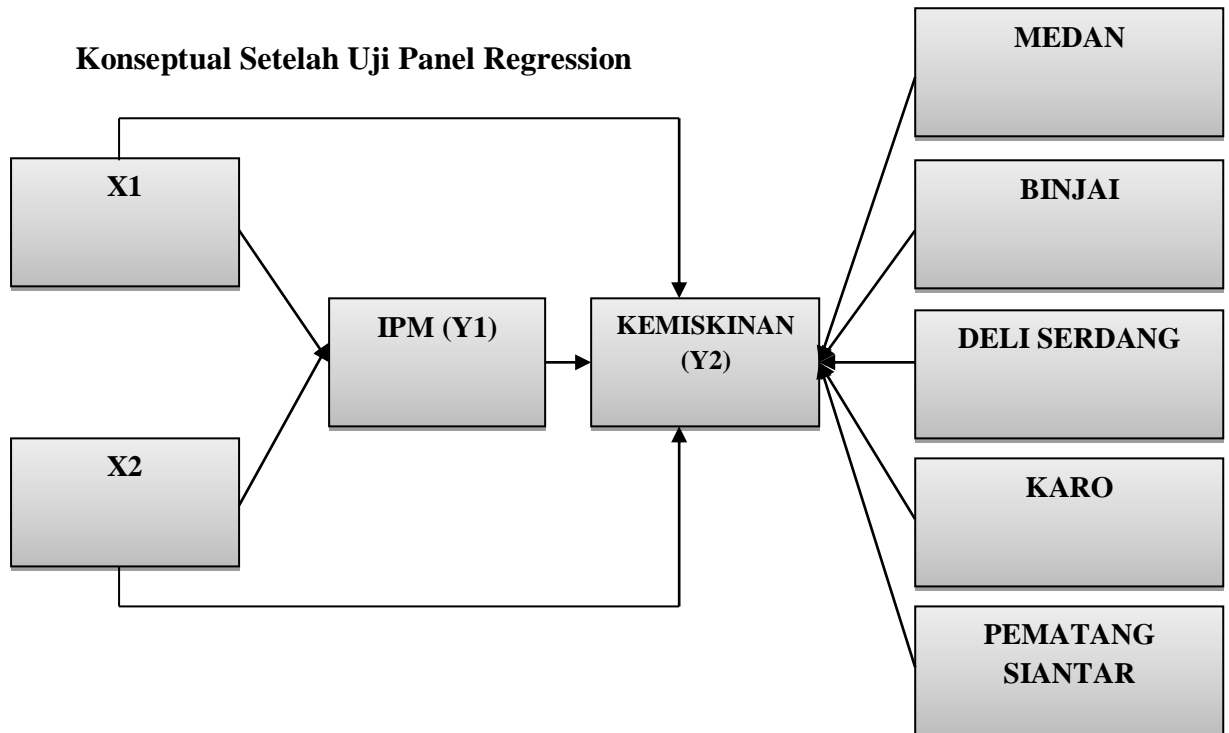
C. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ada namanya kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah hubungan timbal balik antara satu variabel dengan variabel lainnya secara parsial maupun simultan. Dalam penelitian ini hubungan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan berhubungan terhadap variabel Tingkat pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Investasi, Pendapatan Asli Daerah, Gini Rasio, dan Belanja Daerah.



Gambar 2.2 : Kerangka Konseptual *Panel Regression*

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka konseptual *Panel Regression* sebagai metode pertama. Dari 7 (Tujuh) variabel maka akan dilihat variabel yang paling berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).



Gambar 2.3 : Kerangka *Konseptual Path Analys*

Dari hasil regresi dengan metode *Panel Regression* akan dapat 2 (dua) variabel atau lebih yang paling berpengaruh terhadap kemiskinan. Kemudian akan di olah lagi dengan menggunakan metode *path analys*.

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara/kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya masih harus diuji secara empiris. Hipotesis yang dimaksud merupakan dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah.

Dengan mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Semua faktor-faktor (Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Investasi, Pendapatan Asli Daerah, Gini Rasio, dan Belanja Daerah) relevan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan di 5 Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara.
2. Faktor-faktor yang relevan tersebut berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan di 5 Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian asosiatif/kuantitatif. Menurut (Rusiadi 2013:14 dalam Indri 2017:58) penelitian asosiatif/kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui derajat hubungan dan pola/bentuk pengaruh antar dua variabel atau lebih, dimana dengan penelitian ini maka akan dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan suatu gejala. Untuk mendukung analisis kuantitatif digunakan model *Panel Regression* dan *Path Analys* dimana kedua model ini mampu menjelaskan hubungan keterkaitan antar variabel.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di 5 Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara yaitu Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, dan Kota Pematang Siantar.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang direncanakan mulai Juli 2018 s/d September 2018 dan rincian waktu penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian

No	Jenis kegiatan	Jul	Agust	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Riset awal/Pengajuan judul	■							
2	Penyusunan proposal	■	■						
3	Perbaikan / Acc Proposal		■	■					
4	Seminar Proposal				■				
5	Pengolahan Data				■	■			
6	Penyusunan Skripsi						■		
7	Bimbingan Skripsi						■	■	
8	Sidang Meja Hijau								■

C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional merupakan acuan dari kandasian teoritas yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variable yang satu dengan yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan data yang diinginkan. Untuk memudahkan pemahaman terhadap variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini maka perlu diberikan batasan operasional sebagai berikut :

Tabel 3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran Variabel	Skala
1	Indeks Pembangunan Manusia (Y1)	Sebagai alat ukur perbandingan dari harapan hidup, melek huruf dan pendidikan dengan menjadikan standar hidup yg layak.	Data jumlah IPM berdasarkan harapan hidup, melek huruf dan pendidikan di Kab/Kota.	Rasio
2	Kemiskinan (Y2)	Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan.	Data jumlah penduduk miskin di Kab/Kota.	Rasio
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (X1)	Tingkat angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan.	Data jumlah tingkat pengangguran terbuka di Kab/Kota.	Rasio
4	Pertumbuhan Ekonomi (X2)	Proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk pendapatan nasional	Data jumlah pertumbuhan ekonomi di Kab/Kota	Rasio
5	Inflasi (X3)	Meningkatnya harga-harga secara terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar.	Data Jumlah inflasi yang berada di Kab/Kota.	Rasio
6	Investasi (X4)	Bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan di masa yg akan datang.	Data Jumlah Investasi daerah (PMDN) di Kab/Kota.	Rasio
7	Pendapatan Asli Daerah (X5)	Pendapatan pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih sebagai hasil upaya mandiri Pemerintah Daerah untuk memperoleh dana.	PAD yang digunakan adalah realisasi PAD Kab/Kota.	Rasio
8	Gini Rasio (X6)	Mengukur kesenjangan pendapatan.	Gini Rasio yang digunakan adalah Indeks Koefisien Gini Kab/Kota.	Rasio
9	Belanja Daerah (X7)	Rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPRD.	Jumlah Belanja Daerah yang digunakan sebagai anggaran tahunan pemerintah Kab/Kota.	Rasio

D. Jenis Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dan mengolah data dari informasi terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dan diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2006-2015 (10 Tahun).

F. Teknik Analisis Data

Model analisis dalam penelitian ini menggunakan model analisis data sebagai berikut :

1. Metode Regresi Data Panel

Dalam analisis regresi data panel terdapat tiga pendekatan estimasi yaitu *Common Effect Model* dan Uji Signifikansi.

1) Common Effect Model

Teknik yang paling sederhana dalam mengestimasi model regresi data panel adalah dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* lalu melakukan pendugaan (*pooling*). Data dikombinasikan tanpa memperhatikan

perbedaan antar waktu dan antar individu. Pada pendekatan ini, digunakan metode OLS untuk mengestimasi model (Sukendar & Zainal, 2007).

- 1) Pendekatan ini disebut estimasi *common effect model* atau *pooled least square*. Di setiap observasi terdapat regresi sehingga datanya berdimensi tunggal. Metode ini mengasumsikan bahwa nilai intersep masing-masing variabel adalah sama begitu pun dengan *slope* koefisien. Metode ini mudah, namun model bisa saja mendistorsi gambaran yang sebenarnya dari hubungan antara variabel *dependen* dan variabel *independen* antar unit *cross section* (Sukendar & Zainal, 2007). Uji Signifikansi

- a. Uji Simultan

Uji F atau uji simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Hasil uji F dilihat dalam table ANOVA dalam kolom sig. dengan taraf signifikansi 5% (0,05). Jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Namun jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

b. Uji Parsial

Uji $-t$ atau uji parsial digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel. Hasil uji dapat dilihat pada tabel *coefficients* pada kolom sig. Jika probabilitas nilai t atau signifikansi $< 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Namun jika nilai probabilitas t atau signifikansi $> 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

2. Model Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Path analysis atau analisis jalur digunakan untuk menganalisis pola hubungan diantara variabel (Sani dan maharani, 2013:74). Model ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas (eksogen) terhadap variabel (endogen). Koefisien jalur adalah koefisien regresi yang distandarkan, yaitu koefisien regresi yang dihitung dari basis data yang telah riset dalam angka baku (Z -score). Analisis ini dibantu oleh bantuan software SPSS 16, dengan ketentuan uji F pada $\text{Alpha} = 0,05$ atau $p \leq 0,05$ sebagai taraf signifikansi F (sig. F) sedangkan untuk uji T taraf signifikansi $\text{Alpha} = 0,05$ atau $P \leq 0,05$ yang dimunculkan kode (sig. T) dimana hal

tersebut digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh tidak langsung dari variabel bebas terhadap variabel terkait.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Indeks Pembangunan Manusia di 5 Kab/Kota Prov. Sumatera Utara

Selain keberhasilan pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menjadi acuan dalam penentuan alokasi dana bantuan atau insentif daerah dan sejumlah keputusan penting lainnya. Secara umum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 5 Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara (Medan, Binjai, Pematang Siantar, Karo dan Deli Serdang) dari tahun 2006 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan secara signifikan namun mengalami penurunan pada tahun 2014. Kota Medan menurun sebesar 6,49%, Kota Binjai menurun sebesar 5,24%, Kab. Deli Serdang menurun sebesar 4,84%, Kab. Karo menurun sebesar 4,92%, dan Kota Pematang Siantar menurun sebesar 2,79% yang diakibatkan oleh fasilitas pendidikan di 5 Kab/Kota tersebut tidak memadai dan berada di bawah rata-rata nasional.

2. Deskripsi Persentase Penduduk Miskin di 5 Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara

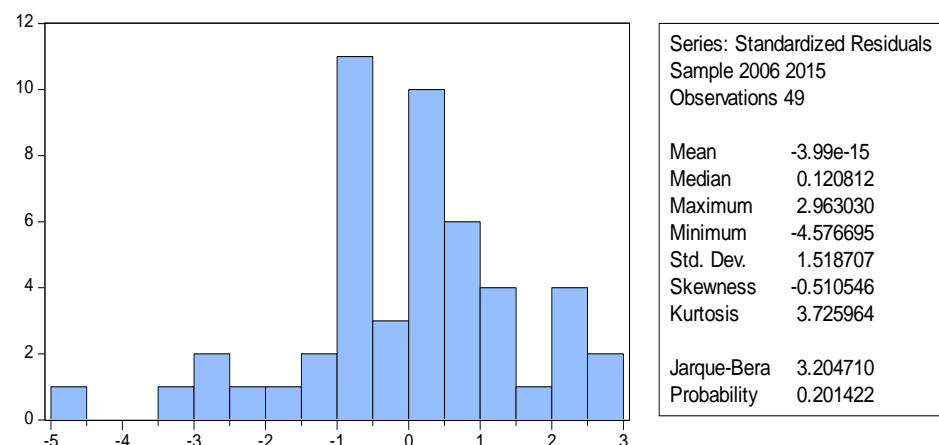
Kemiskinan harus diletakkan menjadi pusat perhatian agar tidak semakin tumbuh. Di 5 Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara (Medan, Binjai, Pematang Siantar, Karo dan Deli Serdang) masih banyak terdapat ketimpangan sosial yang berakibat pada meningkatnya Jumlah Penduduk

Miskin. Peningkatan ini salah satunya diakibatkan oleh naiknya jumlah kepadatan penduduk menjadi 12,98 juta jiwa. Pada tahun 2010 persentase penduduk miskin meningkat di kota Medan sebesar 10,43%, di Kota Binjai meningkat sebesar 8,12%, Kabupaten Deli Serdang mencapai 6,29%, Kabupaten Karo memuncak sebesar 20,96% dan Kota Pematang Siantar meningkat sebesar 13,36%. Hal ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk miskin di desa maupun di wilayah perkotaan.

3. Hasil Uji Asumsi Klasik Data Panel

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas kedua-duanya berdistribusi normal atau tidak. Pengambilan keputusan dengan *Jarque-Bera test* atau J-B test yaitu apabila nilai *probability* > 5%, maka variabel-variabel tersebut berdistribusi normal.



Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan uji normalitas di atas, probabilitas sebesar 0.201422 menunjukkan bahwa $prob > 5\%$. Sehingga dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode waktu atau ruang dengan kesalahan pengganggu pada waktu atau ruang sebelumnya. Untuk mendeteksi adanya masalah ini, dapat digunakan uji *Durbin-Watson (DW)*. Kriteria dari uji DW sebagai berikut :

- (1) Jika $dw < dL$ maka terdapat autokorelasi positif,
- (2) Jika $dw > dU$ maka tidak terdapat autokorelasi positif,
- (3) Jika $dL < dw < dU$ maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan.
- (4) Jika $(4 - dw) < dL$ maka terdapat autokorelasi negatif,
- (5) Jika $(4 - dw) > dU$ maka tidak terdapat autokorelasi negatif

Dari hasil uji *DW* yang telah dilakukan, didapatkan hasil *DW* dari penelitian ini adalah sebesar 2,092797. Jumlah sampel pada penelitian (n) sebanyak 50, $k = 7$, maka nilai dL sebesar 1,29059 dan dU sebesar 1,82203, maka karena $DW > dU$ ($2,092797 > 1,82203$) maka data tidak mengalami autokorelasi positif dan $(4-DW) > dU$ ($1,907203 > 1,82203$) maka data tidak mengalami autokorelasi negatif.

4. Analisis Data Panel

Dari uji spesifikasi di atas, maka model sebaiknya menggunakan estimasi dengan *Common Effect*. Pada pengujian sebelumnya, model telah lolos dari uji asumsi klasik, sehingga hasil estimasi konsisten dan tidak bias. Hasil estimasi model regresi data panel adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Hasil Estimasi Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
TPT	0.085654	0.067474	1.269439	0.2114
PDB	0.907412	0.327207	2.773202	0.0083
INF	-0.018566	0.077826	-0.238563	0.8126
INV	8.91E-09	1.59E-08	0.558931	0.5792
PAD	-0.001987	0.001757	-1.130742	0.2647
GR	16.15843	6.526277	2.475903	0.0175
BD	-1.74E-10	3.92E-10	-0.444926	0.6587
C	65.15285	2.441893	26.68128	0.0000
R-squared	0.353726	Mean dependent var	75.75265	
Adjusted R-squared	0.243387	S.D. dependent var	1.889147	
S.E. of regression	1.643247	Akaike info criterion	3.979508	
Sum squared resid	110.7107	Schwarz criterion	4.288376	
Log likelihood	-89.49794	Hannan-Quinn criter.	4.096692	
F-statistic	3.205801	Durbin-Watson stat	2.092797	
Prob(F-statistic)	0.008407			

Sumber : *Output Eviews 7*

Dari hasil diatas diketahui probabilitas untuk variabel PDB dan GR signifikan dalam taraf error 5%. Sedangkan untuk variabel TPT, INF, INV, PAD dan GR memiliki nilai probabilitas diatas 0,05 yang berarti bahwa variabel ini tidak signifikan.

5. Hasil Uji Signifikansi

a. Uji Simultan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan *software Eviews 7* diperoleh nilai F-hitung sebesar 3,205801 dan probabilitas F sebesar 0,008407. Dalam taraf signifikansi 5% maka uji F signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas secara bersama-sama

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Variabel TPT, PDB, INF, INV, PAD, GR dan BD secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap IPM.

b. Uji Parsial

Hasil analisis uji parsial menunjukkan masing-masing variabel bebas mempengaruhi variabel terikat.

- 1) Pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka memiliki t-hitung sebesar 1,269439 dan probabilitas sebesar 0,2114. Dalam taraf signifikansi 5% maka variabel tingkat pengangguran terbuka secara individu tidak signifikan dalam mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Sumatera Utara.
- 2) Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki t-hitung sebesar 2,773202 dan probabilitas sebesar 0,0083. Dalam taraf signifikansi 5% maka variabel pertumbuhan ekonomi secara individu signifikan dalam mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Sumatera Utara.
- 3) Pengaruh inflasi terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel inflasi memiliki t-hitung sebesar -0,238563 dan

probabilitas sebesar 0,8126. Dalam taraf signifikansi 5% maka variabel inflasi secara individu tidak signifikan dalam mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Sumatera Utara.

- 4) Pengaruh investasi terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel investasi memiliki t-hitung sebesar 0,558931 dan probabilitas sebesar 0,5792. Dalam taraf signifikansi 5% maka variabel investasi secara individu tidak signifikan dalam mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Sumatera Utara.
- 5) Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah memiliki t-hitung sebesar -1,130742 dan probabilitas sebesar 0,2647. Dalam taraf signifikansi 5% maka variabel pendapatan asli daerah secara individu tidak signifikan dalam mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Sumatera Utara.
- 6) Pengaruh gini rasio terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel gini rasio memiliki t-hitung sebesar 2,475903 dan probabilitas sebesar 0,0175. Dalam taraf signifikansi 5% maka variabel gini rasio secara individu signifikan dalam mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Sumatera Utara.

7) Pengaruh belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel belanja daerah memiliki t-hitung sebesar -0,444926 dan probabilitas sebesar 0,6587. Dalam taraf signifikansi 5% maka variabel belanja daerah secara individu tidak signifikan dalam mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Sumatera Utara.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

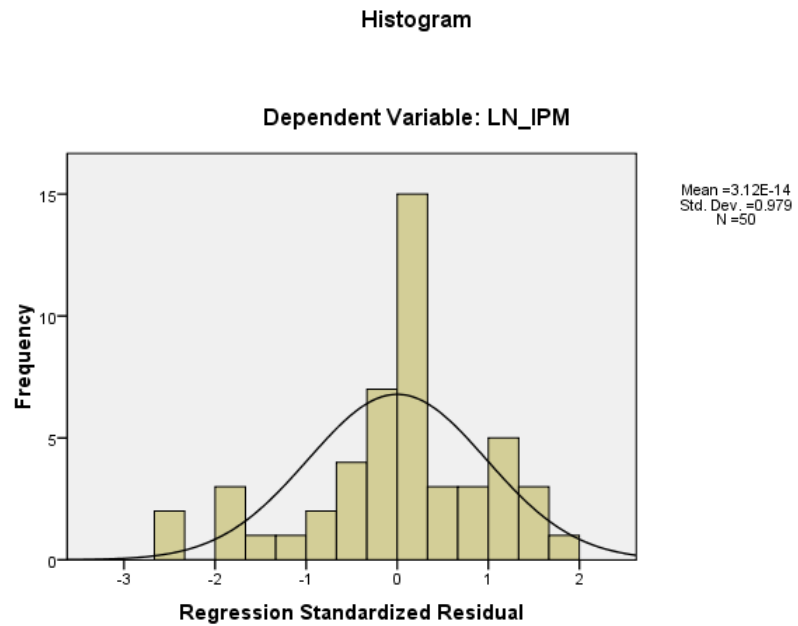
Koefisien determinasi atau *goodness of fit* diperoleh angka sebesar 0,353726. Hal ini berarti bahwa kontribusi seluruh variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sebesar 35,37%. Sisanya sebesar 64,63% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

6. Pengujian Asumsi Klasik *Path Analysis*

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar layak digunakan atau tidak. Data yang diperoleh dari data sekunder, selanjutnya akan diuji dengan uji asumsi klasik sebagai berikut:

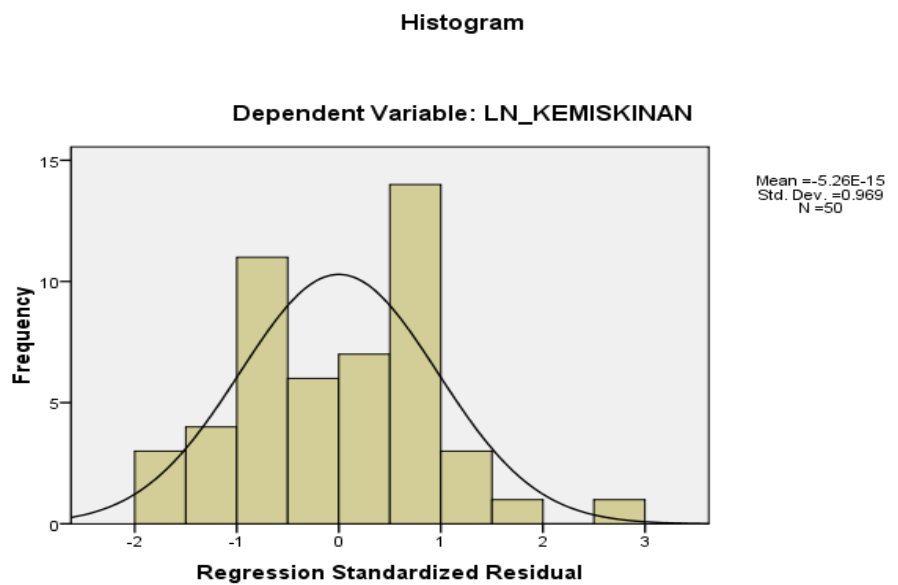
a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali dalam Rusiadi, 2013 : 164)



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS ver. 16.0

Gambar 4.2 Histogram Uji Normalitas I

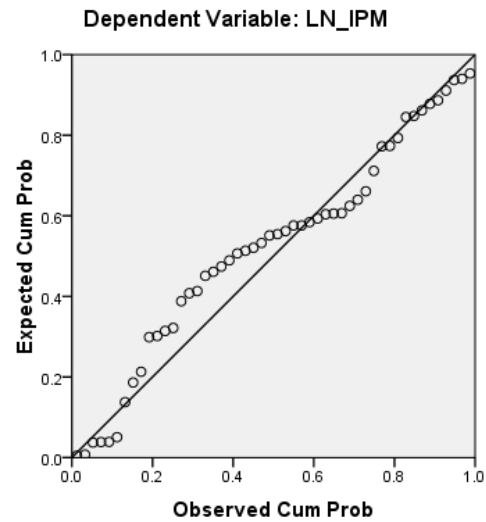


Sumber : Hasil Pengolahan SPSS ver. 16.0

Gambar 4.3 Histogram Uji Normalitas II

Hasil pengujian normalitas data diketahui bahwa data telah berdistribusi secara normal, dimana gambar histogram memiliki garis membentuk lonceng dan memiliki kecembungan seimbang ditengah.

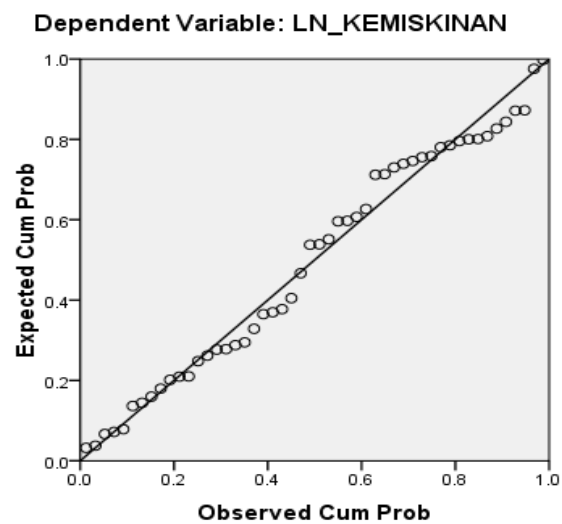
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS ver. 16.0

Gambar 4.4 PP Plot Uji Normalitas I

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS ver. 16.0

Gambar 4.5 PP Plot Uji Normalitas II

Kemudian untuk hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan gambar PP Plot terlihat titik-titik data untuk variabel pertumbuhan ekonomi, gini rasio, indeks pembangunan manusia dan kemiskinan yang menyebar berada di sekitar garis diagonal sehingga data telah berdistribusi secara normal.

Dari keempat gambar diatas, maka dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan uji normalitas data, data untuk variabel pertumbuhan ekonomi, gini rasio, indeks pembangunan manusia dan kemiskinan berdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (Ghozali dalam Baihaqi, 2010:68). Uji ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS. Apabila nilai *tolerance value* $> 0,10$ atau $VIF < 10$ maka disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Multikolinieritas dari hasil data skunder yang telah diolah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Uji Multikolinieritas I
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.307	.056		76.551	.000		
LN_PDB	.051	.024	.283	2.157	.036	.930	1.076
LN_GR	.059	.023	.339	2.579	.013	.930	1.076

a. Dependent Variable: LN_IPM

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS ver. 16.0

Hasil uji multikolinieritas diketahui bahwa nilai *tolerance* dan VIF pada tabel diatas menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan gini rasio dalam penelitian ini tidak mengalami multikolinieritas. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *tolerance* yang besarnya jauh melebihi angka 0,1 dan VIF variabel tersebut yang besarnya kurang dari 5.

Tabel 4.3 Uji Multikolinieritas II
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-13.996	9.062		-1.545	.129		
LN_PDB	-.974	.354	-.394	-2.749	.009	.846	1.182
LN_GR	.432	.349	.181	1.238	.222	.814	1.228
LN_IPM	4.251	2.095	.308	2.029	.048	.754	1.326

a. Dependent Variable:

LN_KEMISKINAN

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS ver. 16.0

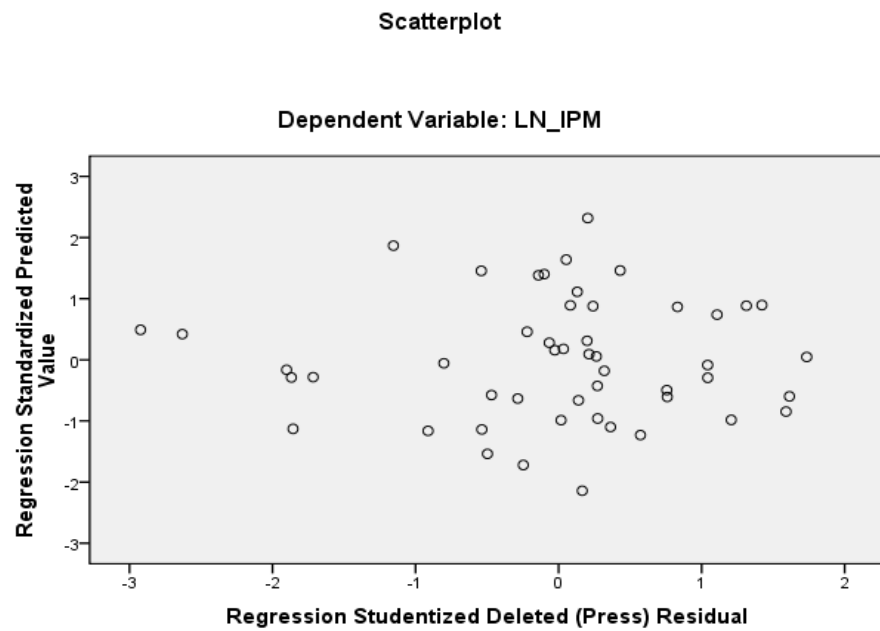
Hasil uji multikolinieritas diketahui bahwa nilai *tolerance* dan VIF pada tabel diatas menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, gini rasio dan indeks pembangunan manusia dalam penelitian ini tidak mengalami multikolinieritas. Hal ini ditunjukkan

oleh nilai *tolerance* yang besarnya jauh melebihi angka 0,1 dan VIF variabel tersebut yang besarnya kurang dari 5.

c. Uji Heteroskedastisitas

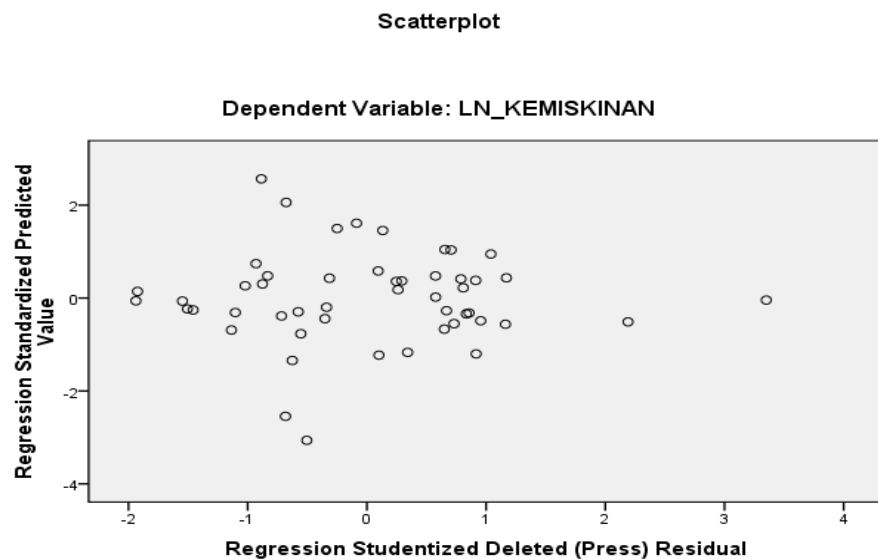
Salah satu asumsi penting dari model regresi linier klasik adalah bahwa variance dari residual yang muncul dalam fungsi regresi adalah homokedastisitas, yaitu terjadi kesamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Gujarati dalam Baihaqi, 2010:69). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dilakukan *Uji Gletser* dengan melihat tingkat signifikan dari hasil regresi nilai absolute residual sebagai variabel terikat dengan variabel karakteristiknya. Deteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat juga dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu (bergantung, melebar kemudian menyempit) pada grafik plot (*Scatterplot*) antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan yaitu model yang terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap disebut homokedastisitas.



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS ver. 16.0

Gambar 4.6 Scatterplot Uji Heteroskedastisitas I



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS ver. 16.0

Gambar 4.7 Scatterplot Uji Heteroskedastisitas II

Gambar *Scaterplot* menunjukkan bahwa titik-titik yang dihasilkan menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola atau

trend garis tertentu. Gambar di atas juga menunjukkan bahwa sebaran data ada di sekitar titik nol. Dari hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah heteroskedastisitas, dengan perkataan lain : variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian ini bersifat homoskedastisitas.

7. Pengujian Test Goodnes Of Fit

a. Model Analisis Regresi Berganda

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan rumus persamaan :

1. $X_1 + X_2 + Y_1$
2. $X_1 + X_2 + Y_1 + Y_2$

Dari pengolahan data skunder dengan menggunakan alat bantu aplikasi *Software SPSS 16.0 for Windows* maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini :

Tabel 4.4 Regresi Linier Berganda I
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.307	.056		76.551	.000		
LN_PDB	.051	.024	.283	2.157	.036	.930	1.076
LN_GR	.059	.023	.339	2.579	.013	.930	1.076

a. Dependent Variable: LN_IPM

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS ver. 16.0

Persamaan regresi berganda diperoleh $Y_1 = 4,307 + 0,051 X_1 + 0,059 X_2$. Artinya nilai positif melambangkan jika pertumbuhan ekonomi (X_1) dan gini rasio (X_2) dinaikkan satu satuan melalui indeks pembangunan manusia (Y_1) akan sebesar 4,3017satuan.

Tabel 4.5 Regresi Linier Berganda II
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-13.996	9.062		-1.545	.129		
LN_PDB	-.974	.354	-.394	-2.749	.009	.846	1.182
LN_GR	.432	.349	.181	1.238	.222	.814	1.228
LN_IPM	4.251	2.095	.308	2.029	.048	.754	1.326

a. Dependent Variable:
LN_KEMISKINAN

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.5 tersebut diperoleh regresi linier berganda sebagai berikut $Y_2 = -13,996 - 0,974 X_1 + 0,432 X_2 + 4,251 X_3 + \varepsilon$

Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda adalah:

- 1) Jika segala sesuatu pada variabel-variabel bebas dianggap nol maka nilai kemiskinan (Y_2) adalah sebesar -13,996.
- 2) Jika terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 1, maka kemiskinan (Y_2) akan menurun sebesar 0,974.
- 3) Jika terjadi peningkatan gini ratio sebesar 1, maka kemiskinan (Y_2) akan menurun sebesar 0,432.
- 4) Jika terjadi kenaikan tingkat indeks pembangunan manusia sebesar 1, maka kemiskinan (Y_2) akan menurun sebesar 4,251.

b. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji statistic F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimaksud dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependent (Ghozali dalam Baihaqi, 2010:70).

Uji F menguji pengaruh simultan antara variabel indenpenden terhadap variabel dependen. Kriteria pengujiannya adalah :

- 1) Terima H_0 (tolak H_1), apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $\text{sig } F > \alpha 5\%$
- 2) Tolak H_0 (terima H_1), apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $\text{sig } F < \alpha 5\%$

Dari pengolahan data skunder dengan menggunakan alat bantu aplikasi *Software SPSS 19.00 for Windows* maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini:

Tabel 4.6 Simultan I
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.007	2	.004	7.667	.001 ^a
	Residual	.023	47	.000		
	Total	.030	49			

a. Predictors: (Constant), LN_GR, LN_PDB

b. Dependent Variable: LN_IPM

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS ver. 16.0

Berdasarkan 4.6 diatas, diketahui nilai probabilitas sig 0,001 < α 0,05, maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Hasil uji F menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan gini rasio secara bersama-sama signifikan mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Sumatera Utara.

Tabel 4.7 Simultan II
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.154	3	.385	3.846	.015 ^a
	Residual	4.602	46	.100		
	Total	5.756	49			

a. Predictors: (Constant), LN_IPM, LN_PDB, LN_GR

b. Dependent Variable: LN_KEMISKINAN

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS ver. 16.0

Berdasarkan 4.7 diatas, diketahui nilai probabilitas sig 0,015 < α 0,05, maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Hasil uji F menunjukkan pertumbuhan ekonomi, gini rasio dan indeks pembangunan manusia

secara bersama-sama signifikan mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten/Kota Sumatera Utara.

c. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji statistic t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independent secara individual dalam menerangkan variable dependent (Ghozali dalam Baihaqi, 2010:70). Dari pengolahan data skunder dengan menggunakan alat bantu aplikasi *Software SPSS 16.00 for Windows* maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini :

**Tabel 4.8 Uji Parsial I
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.307	.056		76.551	.000		
LN_PDB	.051	.024	.283	2.157	.036	.930	1.076
LN_GR	.059	.023	.339	2.579	.013	.930	1.076

a. Dependent Variable: LN_IPM

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS ver. 16.0

Hasil uji t secara parsial diketahui :

- 1) Nilai sig. pertumbuhan ekonomi sebesar $0,036 < 0,05$ sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak artinya pertumbuhan ekonomi signifikan mempengaruhi indeks pembangunan manusia.
- 2) Nilai sig. gini rasio sebesar $0,013 < 0,05$ sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak artinya gini rasio signifikan mempengaruhi indeks pembangunan manusia.

**Tabel 4.9 Uji Parsial II
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-13.996	9.062		-1.545	.129		
LN_PDB	-.974	.354	-.394	-2.749	.009	.846	1.182
LN_GR	.432	.349	.181	1.238	.222	.814	1.228
LN_IPM	4.251	2.095	.308	2.029	.048	.754	1.326

a. Dependent Variable:
LN_KEMISKINAN

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS ver. 16.0

Hasil uji t secara parsial diketahui :

- 1) Nilai sig. pertumbuhan ekonomi sebesar $0,009 < 0,05$ sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak artinya pertumbuhan ekonomi signifikan mempengaruhi kemiskinan.
- 2) Nilai sig. gini rasio sebesar $0,222 > 0,05$ sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak artinya gini rasio tidak signifikan mempengaruhi kemiskinan.
- 3) Nilai sig. indeks pembangunan manusia sebesar $0,048 < 0,05$ sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak artinya indeks pembangunan manusia signifikan mempengaruhi kemiskinan.

d. Uji Determinasi

Analisis determinasi ini digunakan untuk mengetahui persentase besarnya variasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari pengolahan data skuner dengan menggunakan alat bantu

aplikasi *Software SPSS 16.00 for Windows* maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini:

Tabel 4.10 Uji Determinasi I
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.496 ^a	.246	.214	.02202

a. Predictors: (Constant), LN_GR, LN_PDB

b. Dependent Variable: LN_IPM

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS ver. 16.0

Dalam regresi berganda uji determinasi lebih tepat dengan menggunakan nilai pada kolom *Adjusted R Square* sebesar 0,214. Untuk melihat besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan cara menghitung koefisien determinasi = $R^2 \times 100\%$ sehingga koefisien determinasinya sebesar 21,4%. Artinya variasi dari indeks pembangunan manusia mampu dijelaskan sebesar 21,4% oleh pertumbuhan ekonomi dan gini rasio, sedangkan sisanya sebesar 78,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 4.11 Uji Determinasi II
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.448 ^a	.201	.148	.31628

a. Predictors: (Constant), LN_IPM, LN_PDB, LN_GR

b. Dependent Variable: LN_KEMISKINAN

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS ver. 16.0

Dalam regresi berganda uji determinasi lebih tepat dengan menggunakan nilai pada kolom *Adjusted R Square* sebesar 0,148. Untuk melihat besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat

dengan cara menghitung koefisien determinasi = $R^2 \times 100\%$ sehingga koefisien determinasinya sebesar 14,8%. Artinya variasi dari kemiskinan mampu dijelaskan sebesar 14,8% oleh pertumbuhan ekonomi, gini rasio dan indeks pembangunan manusia sedangkan sisanya sebesar 85,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

e. Menghitung Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total .

1) Menghitung Pengaruh Langsung (*Direct Effect* atau DE)

Pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia X_1 ke $Y_1 = 0,283$. Pengaruh variabel gini rasio terhadap indeks pembangunan manusia X_2 ke $Y_1 = 0,339$. Pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan X_1 ke $Y_2 = -0,398$. Pengaruh variabel gini rasio terhadap kemiskinan X_2 ke $Y_2 = 0,181$. Pengaruh variabel indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan Y_1 ke $Y_2 = 0,308$.

2) Menghitung Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Effect* atau IE)

Pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan melalui indeks pembangunan manusia $X_1, Y_1 \times Y_1, Y_2 = (0,283 \times 0,308) = 0,0871$. Pengaruh variabel gini rasio terhadap kemiskinan melalui indeks pembangunan manusia $X_2, Y_1 \times Y_1, Y_2 = (0,339 \times 0,308) = 0,10441$.

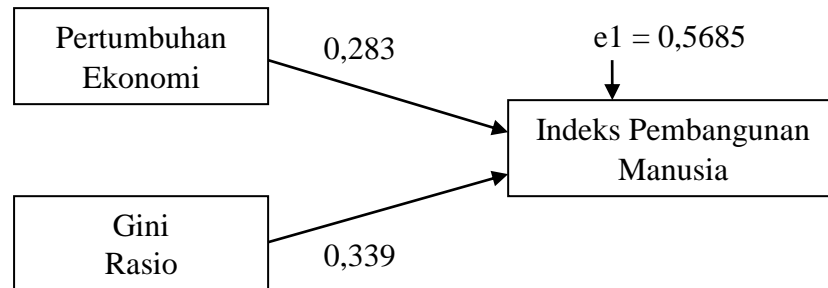
3) Menghitung Pengaruh Total (*Total Effect*)

Pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan melalui indeks pembangunan manusia $X_1, Y_1 + Y_1, Y_2 = (0,283 + 0,308) = 0,591$. Pengaruh variabel gini rasio terhadap kemiskinan melalui indeks pembangunan manusia $X_2, Y_1 + Y_1, Y_2 = (0,339 + 0,308) = 0,647$.

f. Menghitung Koefisien Jalur

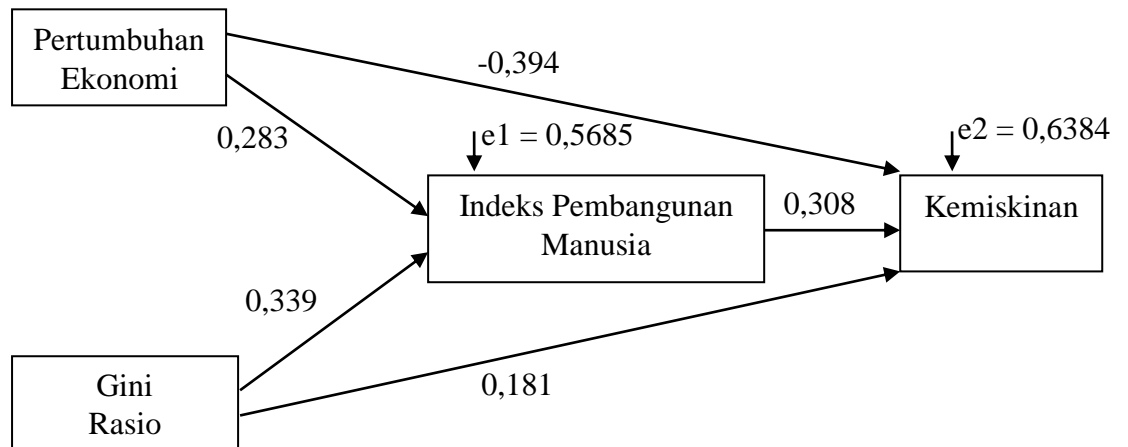
1) Koefisien Jalur Model I

Berdasarkan out put regresi model I pada bagian tabel 4.8 Coefficients^a dapat diketahui bahwa nilai signifikan dari kedua variabel yaitu $X_1 = 0,036$ dan $X_2 = 0,013$ lebih kecil dari 0,05. Hasil ini meberikan kesimpulan bahwa regresi model I, yakni variabel pertumbuhan ekonomi dan gini rasio berpengaruh signifikan terhadap indeks pemabangunan manusia. Besarnya nilai *R Square* yang terdapat pada tabel 4.10 model Summary adalah 0,246, hal ini menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh pertumbuhan ekonomi dan gini rasio terhadap indek pembangunan manusia adalah sebesar 24,6% sementara sisanya 75,4% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukan dalam penelitian. Untuk mencari nilai e1 dapat di cari dengan rumus $e1 = (1-0,246)^2 = 0,5685$. Dengan demikian diperoleh diagram jalur model struktur I sebagai berikut:



2) Koefisien Jalur Model II

Berdasarkan out put regresi model II pada bagian tabel 4.9 Coefficients^a dapat diketahui bahwa nilai signifikan dari ketiga variabel yaitu $X_1 = 0,009$ dan $Y_1 = 0,048$ lebih kecil dari 0,05 sedangkan nilai $X_2 = 0,222$ lebih besar dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model II, yakni variabel pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan sedangkan gini rasio tidak signifikan mempengaruhi kemiskinan. Besarnya nilai *R Square* yang terdapat pada tabel 4.11 model Summary adalah 0,201, hal ini menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh pertumbuhan ekonomi, gini rasio dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan adalah sebesar 20,1% sementara sisanya 79,9% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukan dalam penelitian. Untuk mencari nilai e_2 dapat di cari dengan rumus $e_2 = (1-0,201)^2 = 0,6384$. Dengan demikian diperoleh diagram jalur model struktur II sebagai berikut:



B. Pembahasan

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dengan nilai t-hitung sebesar 2,157 dan sig. 0,036 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 1%, maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan ada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Sumatera Utara.

Dengan begitu banyak lapangan pekerjaan tercipta sehingga akan banyak pula tenaga kerja yang terserap dan efeknya akan meningkatkan

pendapatan. Pada saat yang demikian konsumsi pun akan meningkat sehingga berpengaruh pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan memberi efek positif pada indeks pembangunan manusia sehingga sesuai dengan hipotesis awal yaitu ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka indeks pembangunan manusia akan meningkat juga.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Kuznet di mana salah satu karakteristik pertumbuhan ekonomi modern adalah tingginya pertumbuhan output per kapita (Todaro dalam Mirza, 2011: 110). Pertumbuhan output yang dimaksudkan adalah PDRB per kapita, tingginya pertumbuhan output menjadikan perubahan pola konsumsi dalam pemenuhan kebutuhan. Artinya semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan semakin tinggi pertumbuhan output per kapita dan mengubah pola konsumsi dalam hal ini tingkat daya beli masyarakat juga akan semakin tinggi. Tingginya daya beli masyarakat akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia karena daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator komposit dalam IPM yang disebut indikator pendapatan. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

Dalam teori pertumbuhan ekonomi secara jelas kaitan pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi dapat dipahami dari 2 (dua) arah, yaitu pengaruh dari pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia dan pengaruh dari pembangunan manusia terhadap

pertumbuhan ekonomi. Keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia tidak bisa dianggap linier atau langsung, namun ditentukan oleh sejauh mana peranan faktor-faktor yang menghubungkan kedua konsep tersebut. Studi juga menyatakan bahwa investasi asing langsung ternyata juga memiliki pengaruh terhadap IPM. (Sulaiman dalam Maulana dan Ari Bowo, 2013:167).

Semakin baik kondisi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah berarti mencerminkan keadaan ekonomi masyarakat yang semakin baik atau semakin sejahtera masyarakat. Dengan demikian mereka akan memiliki peluang yang lebih banyak untuk meningkatkan kualitas hidup dengan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi serta mengikuti berbagai pelatihan *soft skill* guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas.

2. Pengaruh Gini Rasio Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel gini rasio berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Sumatera dengan nilai t-hitung sebesar 2,575 dan signifikan 0,013 Utara. Gini rasio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai indeks gini berkisar antara 0 hingga 1. Indeks gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama, sebaliknya jika bernilai 1 atau semakin mendekati 1 maka setiap orang memiliki pendapatan yang berbeda dan itulah yang kemudian dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Romi Irjaya (2017), yang menyatakan bahwa gini rasio merupakan alat untuk mengukur distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Dengan begitu semakin meratanya jumlah penghasilan dan kekayaan pengaruhnya akan menyebabkan naiknya tingkat kesejahteraan dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Begitu pula sebaliknya semakin tidak meratanya pendapatan dan kekayaan di Sumatera Utara akan menyebabkan semakin rendahnya tingkat kesejahteraan dan Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara.

3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan

Hasil pengujian pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan. Berdasarkan pada kolom signifikansi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki nilai t-hitung sebesar -2,749 dan signifikansi sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Selain itu, pertumbuhan ekonomi memiliki koefisien beta sebesar -0,974, artinya jika pertumbuhan ekonomi naik satu persen, maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar 0,974. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Sumatera Utara.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian secara berkesinambungan menuju

kearah yang lebih baik. Besarnya output nasional merupakan gambaran awal tentang produktivitas dan tingkat kemakmuran suatu negara. Alat ukur yang disepakati tentang tingkat kemakmuran adalah output nasional per kapita. Nilai output per kapita diperoleh dengan cara membagi besarnya output nasional dengan jumlah penduduk pada tahun yang bersangkutan. Jika angka output per kapita makin besar, tingkat kemakmuran dianggap makin tinggi (Rahardja, dan Mandala Manurung dalam Ningtyas 2017:117).

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Suparmoko dalam Ningtyas (2017:117) pertumbuhan ekonomi yang lebih tepat diukur dengan menggunakan pertumbuhan pendapatan per kapita menuntut adanya kenaikan produk domestik bruto. PDB itu sangat ditentukan oleh faktor produksi yang digunakan, seperti tenaga kerja, kapital, barang sumber daya alam, tingkat teknologi, dan kondisi sosial dalam negara yang bersangkutan. Pada umumnya terdapat hubungan yang positif antara jumlah dan kualitas faktor-faktor produksi dan PDB. Semakin banyak digunakan alat kapital, tenaga kerja, dan sumber daya alam, dan tingkat teknologi yang lebih canggih serta keadaan sosial yang mendukung pertumbuhan ekonomi, maka akan meningkat pula PDB suatu negara.

Dasar teori dari korelasi antara pertumbuhan per kapita dengan tingkat kemiskinan tidak berbeda dengan pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Mengikuti hipotesis Kuznet, pada tahap awal dari proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung meningkat, dan pada saat mendekati tahap akhir dari pembangunan jumlah

orang miskin berangsur-angsur berkurang. Tentu banyak faktor-faktor lain selain pertumbuhan pendapatan yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di suatu wilayah atau negara seperti derajat pendidikan, tenaga kerja, dan struktur ekonomi (Tambunan, 2015:107).

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan ada pengaruh negatif dan signifikan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan. Hal ini sesuai karena suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari apa yang dicapai sebelumnya. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat maka sebuah negara dapat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi karena semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi menggambarkan bahwa semakin meningkatnya jumlah barang dan jasa dalam suatu negara tersebut sehingga semakin tinggi pula produktivitas faktor produksi dan upah yang diterima oleh pekerja. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika pertumbuhan ekonomi meningkat akan berdampak pada tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Sumatera Utara menurun.

4. Pengaruh Gini Rasio Terhadap Kemiskinan

Hasil pengujian hipotesis yang keempat tentang pengaruh gini rasio terhadap tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa gini rasio tidak signifikan. Berdasarkan pada kolom signifikansi menunjukkan bahwa gini rasio memiliki nilai signifikansi sebesar 0,222 lebih besar dari 0,05 ($0,222 > 0,05$), maka H_a ditolak dan H_0 diterima. Selain itu, ketimpangan distribusi pendapatan memiliki koefisien sebesar 0,432, artinya jika

ketimpangan distribusi pendapatan naik satu persen, maka tingkat kemiskinan akan naik sebesar 0,432 persen.

Gini rasio tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan atau jika gini rasio naik maka kemiskinan mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan ketidakmerataan dan kemiskinan, distribusi pendapatan dapat dijadikan dasar untuk menganalisis masalah pembangunan yang lebih khusus seperti pertumbuhan penduduk, pengangguran, pembangunan pedesaan, pendidikan di Kabupaten/Kota Sumatera Utara.

5. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan

Hasil pengujian pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa indeks pembangunan berpengaruh signifikan. Berdasarkan pada kolom signifikansi menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia memiliki nilai t-hitung sebesar 2,029 dan signifikansi sebesar 0,048 lebih kecil dari 0,05 ($0,048 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Menurut Lanjouw dalam Satriani (2016:60) pembangunan manusia identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi dibidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk yang tidak miskin, karena bagi penduduk miskin aset utama adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas

pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu meningkatkan produktivitas dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan.

Perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, dan gizi) diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tersedia. Pertumbuhan ekonomi dimulai dari kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. Tenaga kerja yang berpendidikan, berwawasan, memiliki keterampilan yang bagus, sehat secara jasmani dan rohani akan lebih kuat dan mampu berinovasi dan berdaya saing dalam dunia kerja sehingga produktivitas meningkat dan pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Sumatera Utara.

Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi Suliswanto (2010) mengatakan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dengan nilai t-hitung sebesar 2,157 dan sig. $0,036 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 1%, maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Sumatera Utara.
2. Variabel gini rasio berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Sumatera Utara dengan nilai t-hitung sebesar 2,575 dan signifikan 0.013. dengan meratanya jumlah penghasilan dan kekayaan akan memberikan dampak terhadap naiknya tingkat kesejahteraan dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Sumatera Utara.
3. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Sumatera Utara dengan nilai nilai t-hitung sebesar -2,749 dan signifikansi sebesar 0,009. Pertumbuhan ekonomi memiliki koefisien beta sebesar -0,974, artinya jika pertumbuhan ekonomi naik satu persen, maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar 0,974.
4. Variabel gini rasio terhadap tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa gini rasio tidak signifikan. Berdasarkan pada kolom signifikansi menunjukkan

bahwa gini rasio memiliki nilai signifikansi sebesar 0,222 lebih besar dari 0,05. Hal ini disebabkan ketidakmerataan dan kemiskinan, distribusi pendapatan dapat dijadikan dasar untuk menganalisis masalah pembangunan yang lebih khusus seperti pertumbuhan penduduk, pengangguran, pembangunan pedesaan, pendidikan di Kabupaten/Kota Sumatera Utara.

5. Variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Berdasarkan pada kolom signifikansi menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia memiliki nilai t-hitung sebesar 2,029 dan signifikansi sebesar 0,048 lebih kecil dari 0,05. Perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, dan gizi) dapat menurunkan tingkat kemiskinan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka adapun beberapa saran dari penulis yaitu:

1. Untuk peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Sumatera Utara. Pemerintah disarankan dapat mampu merealisasikan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan melakukan perbaikan kemampuan sumberdaya manusia, pengembangan teknologi, pemanfaatan sumberdaya alam sehingga mampu memberikan efek positif terhadap pembangunan manusia yang berkelanjutan.
2. Gini rasio tetap perlu ditekan sehingga pendapatan merata di setiap kalangan masyarakat. Hal lain yang perlu diperhatikan selain pemerataan yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat. Perlunya peningkatan

pendapatan masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah yaitu agar pemerataan pendapatan masyarakat juga diikuti dengan adanya peningkatan pendapatan masyarakat

3. Dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara maka dari itu untuk mengurangi kemiskinan di Sumatera Utara pemerintah perlu merangsang terus pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas sosial politik, karena dalam. Dengan adanya peningkatan investasi akan membuat pertumbuhan ekonomi melaju semakin tinggi. Karena semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka tingkat kemiskinan akan semakin menurun. Apabila pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan maka pendapatan per kapita masyarakat juga bertambah sehingga akan mengakibatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan.
4. Dalam penelitian ini gini rasio tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pemerintah sebaiknya melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pemerataan yang dilakukan secara sistematis, tidak hanya mengandalkan sistem alamiah yaitu *trickle down effect* tetapi juga perlu dilengkapi dengan kebijakan-kebijakan untuk pemerataan. Seperti adanya pajak pendapatan progresif dimana golongan kaya atau lebih kaya dituntut untuk membayar persentase pajak yang lebih besar dibandingkan dengan golongan miskin
5. Variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Kota Sumatera Utara. Oleh sebab itu pemerintah diharapkan merancang suatu program yang berkesinambungan agar dapat memacu

naiknya nilai IPM dengan mempermudah masyarakat untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi dan dipermudah dalam memperoleh akses kesehatan terutama bagi masyarakat kurang mampu.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Alexander, (2015), “Kemiskinan Bukan Aib, Pertanian Ujung Tombak”, Artikel, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kabupaten Muaraenim, diakses dari <http://bappeda.muaraenimkab.go.id> pada tanggal 26 April 2015.
- Ahmad, Khalil., dan Riaz, Ammara., “An Econometric Model of Poverty in Pakistan: ARDL Approach to co-Integration”, *Asian Journal of Business and Management Sciences*, Vol. 1 No. 3, pp. 75-84.
- Adil, e., nasution, m. D. T. P., samrin, s., & rossanty, y. (2017). Efforts to prevent the conflict in the succession of the family business using the strategic collaboration model. *Business and management horizons*, 5(2), 49-59.
- Aspan, h. (2017). “good corporate governance principles in the management of limited liability company. *International journal of law reconstruction*, volume 1 no. 1, pp. 87-100.
- Aspan, h. (2017). “peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum”. *Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional*, isbn 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, h. (2014). “konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik”. *Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung*, volume 2 no. 2, pp. 57-64.
- Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). “the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)”. *International journal of global sustainability*, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.
- Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). “swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs”. *International journal of academic research in business and social sciences*, vol. 5, no. 12, pp. 385-397.
- Barika., (2013), “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran, dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi se Sumatera”, *Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan (JEPP)*, Vol. 05. No. 01, Januari-Juni 2013.
- Bappenas.2004. *Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan Desa*. Jakarta
- Badan Pusat Statistik.2012. *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Utara*. BPS Sumut.

- Dian, Octaviani.2011. *Inflasi, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia :Analisis Indeks Forrester Greer & Horbecke*. Media Ekonomi. Vol. 7 no.8.
- Indrawan, m. I., nasution, m. D. T. P., adil, e., & rossanty, y. (2016). A business model canvas: traditional restaurant “melayu” in north sumatra, indonesia. *Bus. Manag. Strateg*, 7(2), 102-120.
- Jhingan.2007. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jonaidi Arius.2012. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*. Vol I no.01. Jakarta.2012.
- Kembar, Made.2013. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Bali. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Kussetiyono Toni.2013. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Investasi, dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2010. Semarang:UNNES.
- Lincoln, Arsyad.2006. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta : BPEE-UGM.
- Nurul Khasanah.2016. Analisis Determinan Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Subosuka Wonosraten. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nurhadi, Eko. 2009. Analisis Kemiskinan di Daerah Pedesaan dan Perkotaan di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Manajemen Agribisnis : e-Magri*, 1 (2). pp. 17-27
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149-162.
- Purba, r. B. (2018). Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan pada badan keuangan daerah kabupaten tanah datar. *Jurnal akuntansi bisnis dan publik*, 8(1), 99-111.
- Ritonga, m. (2018). Faktor manajemen biaya dan manajemen pemasaran terhadap pendapatan melalui intensitas produksi pada ukm industri rumahan di kota binjai. *Jumant*, 8(2), 68-78.
- Sembiring, Rahmat. 2018. Dampak Perubahan Budaya Sosial Ekonomi Terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Pada Masyarakat Desa Pahlawan. Medan: UNPAB.
- Sembiring, Rahmat. 2016. Determinan Peningkatan dan Pengembangan Sektor Industri Kecil di Kota Binjai. Medan: UNPAB.

- Setiawan, a., hasibuan, h. A., siahaan, a. P. U., indrawan, m. I., rusiadi, i. F., wakhunyi, e., ... & rahayu, s. (2018). Dimensions of cultural intelligence and technology skills on employee performance. *Int. J. Civ. Eng. Technology*, 9(10), 50-60.
- Setiawan, a. (2018). Pengaruh promosi jabatan dan lingkungan kerja terhadap semangat kerja pegawai di lingkungan universitas pembangunan panca budi medan. *Jurnal akuntansi bisnis dan publik*, 8(2), 191-203
- Sari, A. K., Saputra, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). Effect of Fiscal Independence and Local Revenue Against Human Development Index. *Int. J. Bus. Manag. Invent*, 6(7), 62-65.
- Sari, A. K., Saputra, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). Effect of Fiscal Independence and Local Revenue Against Human Development Index. *Int. J. Bus. Manag. Invent*, 6(7), 62-65.
- Sari, P. B., & Dwilita, H. (2018). Prospek Financial Technology (Fintech) Di Sumatera Utara Dilihat Dari Sisi Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan Dan Kemiskinan. *Kajian Akuntansi*, 19(1), 09-18.
- Utomo, Yuni Prihadi. 2013. Eksplorasi Data dan Analisis Regresi dengan SPSS. Surakarta: Muhammdiyah University Press
- Walida, Agus, dan Sri Undai. Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Kemiskinan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Vol IV no.2. Makassar.2015.
- Widodo, Tri. 2006. Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Yacoub.2012. Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Sosial*. Pontianak. Universitas TanjungPura Pontianak.
- Yanti Nurfitri, 2009. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Dan Tingkat Kesempatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1999-2009. Yogyakarta: UPN Yogyakarta.
- Zuhdiyati Noor, 2017, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus Pada 33 Provinsi). Malang : Universitas Brawijaya.